

Sahabat Keluarga



PERTAJAM FOKUS INTERVENSI *STUNTING*

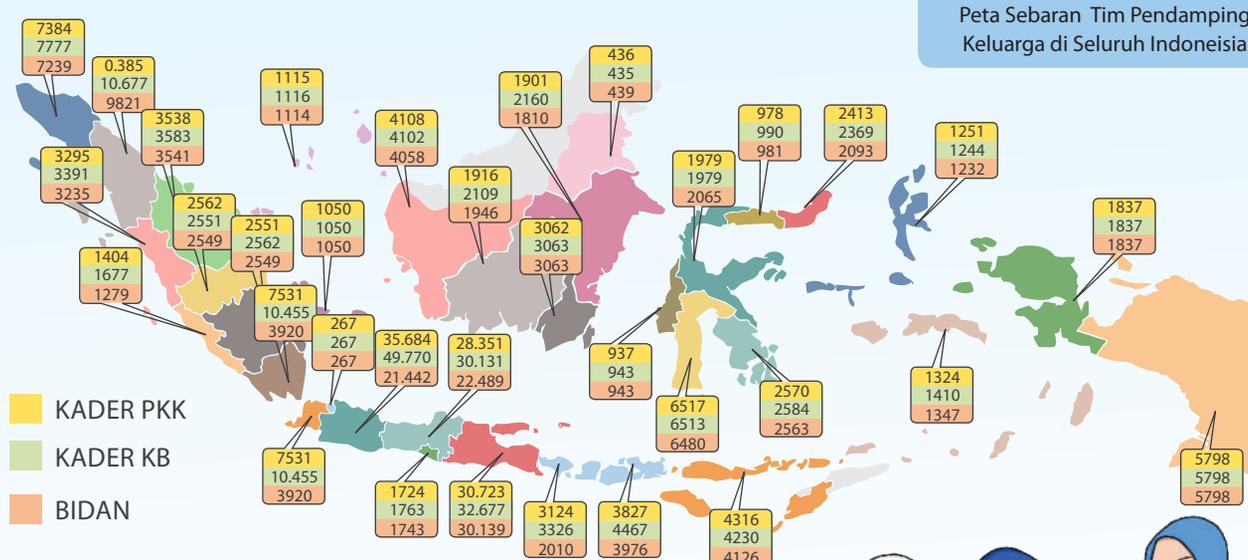
Dokter Hasto: TFR Turun
Karena Pemakaian
Kontrasepsi

Revolusi Makan Ikan
Untuk Optimalkan Bonus Demografi &
Percepat Turunkan *Stunting*



Edisi Oktober 2023

TIM PENDAMPING KELUARGA



KADER PKK	200.943
KADER KB	219.175
BIDAN	173.019

Data by name by address +DKI Jakarta per 2 Oktober 2023: 593.137(98,72%) dari 600.801 orang

Hasil analisis data rekapitulasi 5 (lima) provinsi (Kalimantan Barat, Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan) mengirimkan data TPK namun belum sesuai dengan jumlah target dan atau komposisi dan atau profil bidan yang sudah ditetapkan.

Total Bidan & Non Bidan dalam TPK: 173.019

BIDAN
125.223

NON BIDAN
47.798



PROFIL BIDAN

NON PNS	PNS	TIDAK ADA SIPB	ADA SIPB
64,98%	35,02%	58,35%	41,65%
TIDAK ADA STR	ADA STR	TIDAK PRAKTIK	PRAKTIK
44,65%	55,35%	72,96%	27,04%

PROFIL KB/PLKB & PPPK

PENYULUH KB/PLKB & PPPK **13.476**

Terdiri dari:

PENYULUH KB
10.849

PETUGAS LAPANGAN KB
418

PPPK
2.212

Tidak Termasuk
DKI Jakarta



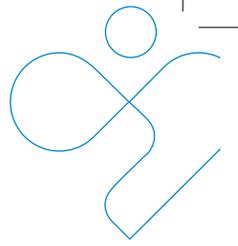
PROFIL IMP

JUMLAH IMP

PPKBD **78.964** SUB PPKBD **345.549** POK KB **321.183**



Sumber: Dallap New SIGA 3 Oktober 2023



EDITORIAL

Kontrasepsi	1
-------------------	---

JENDELA

Kepala BKKBN Minta Penurunan <i>Stunting</i> di Sultra Fokus di 6 Kabupaten	2
-----------------------------------------------------------------------------------	---

LAPORAN UTAMA

Revolusi Makan Ikan Untuk Optimalikan Bonus Demografi & Percepat Turunkan <i>Stunting</i>	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Dokter Hasto: Ikan Lele untuk Cegah <i>Stunting</i>	6
-----------------------------------------------------------	---

Kunjungi Aceh Ini Pesan dr Hasto Terkait <i>Stunting</i>	8
----------------------------------------------------------------	---

BKKBN Sambut Baik <i>FoodCycle</i> Indonesia Bantu Percepat Turunkan <i>Stunting</i>	10
--------------------------------------------------------------------------------------------	----

LAPORAN KHUSUS

Kukuhkan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Jadi Duta BAAS	12
------------------------------------------------------------------------	----

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 BKKBN Tingkatkan Pemakaian Kontrasepsi Modern untuk Turunkan Angka Kematian Bayi	14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Pemkab Taliabu Edukasi Pentingnya Makanan Bergizi Demi Cegah <i>Stunting</i>	16
------------------------------------------------------------------------------------	----

Komitmen Dalam Program BKKBN Walikota dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan Terima Penghargaan MKK	18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ada Dukungan Dana Desa, Penanganan <i>Stunting</i> Jadi Ukuran Keberhasilan Kepala Daerah	20
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Dokter Hasto: TFR Turun Karena Pemakaian Kontrasepsi	22
------------------------------------------------------------	----

Cegah <i>Stunting</i> Pemerintah Prioritaskan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> dan Catin	23
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

STUNTING

Program 'Semesta Mencegah <i>Stunting</i> ' 60 Paket Telur Dibagi Kepada Adik Asuh <i>Stunting</i>	25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Kejar Target <i>Stunting</i> 14 Persen, Sambas Perlu Kerja Keras	26
------------------------------------------------------------------------	----

BKKBN Sebut Penurunan <i>Stunting</i> Tidak Bisa Lepas dari Program KB	28
------------------------------------------------------------------------------	----

Perkuat Kolaborasi dalam Penanganan Sulawesi Utara Gelar Safari <i>Stunting</i>	29
---------------------------------------------------------------------------------------	----

TNI & STUNTING

BKKBN Gandeng TNI AL Gelar Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i>	30
--------------------------------------------------------------------	----

SOSOK

Yayuk Basuki, Petenis Ulung Dekade 1990-an Yang Peduli <i>Stunting</i>	32
------------------------------------------------------------------------------	----

KEPENDUDUKAN

Capaian Pendidikan Kependudukan Rendah Puluhan Kepala Sekolah dan Guru Ikuti Sosialisasi	34
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

KB & KESPRO

Mudah Didapat di <i>Gadget</i> Informasi Kespro Harus Diimbangi Pertemuan Tatap Muka	36
--------------------------------------------------------------------------------------------	----

Kurangi <i>Unmet Need</i> , BKKBN Gelar Pelayanan KB di Wilayah Terpencil	38
---------------------------------------------------------------------------------	----

PEMBANGUNAN KELUARGA

Pembentukannya Lebih Target Maluku Patok Seluruh Desa Miliki Kampung KB pada 2024	39
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

Peran Nyata Kampung KB Menurunkan <i>Stunting</i>	40
---------------------------------------------------------	----

KIPRAH

Edy Wuryanto Optimalkan Sicitu untuk Tekan <i>Stunting</i> Sampai Lapisan Terdalam	42
------------------------------------------------------------------------------------------	----

Wanita Buddhis Indonesia, Bunda Asuh Anak <i>Stunting</i> di Kelurahan Cempaka Putih Barat	44
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BKKBN-UIN Kembali Jalin Kerja Sama, Kali Ini Dalam Penanganan <i>Stunting</i>	46
-------------------------------------------------------------------------------------	----

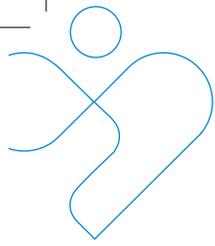
TEKA TEKI SILANG	47
------------------------	----

DAERAH

Siap Jadi <i>Pilot Project</i> Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Lebak Turunkan 1.500 Kader TPK pada Apel Siaga TPK Bergerak	48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

dr HASTO MENJAWAB	50
-------------------------	----

PERSPEKTIF	51
------------------	----



REDAKSI

Sahabat Keluarga



Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id
mediacenterbkkbn@gmail.com
Telp. 0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta *Stunting*.
Kirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi.

Pelindung

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Pengarah

Sekretaris Utama
Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

Penanggungjawab

Plt. Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si

Kepala Biro Umum dan Humas
dr. Victor Palimbong

Redaktur

Ade Anwar
Muktiani Asrie Suryaningrum
Fimela Apriany
Annisa Halimatusyadiah
Bramanda Garibaldi
Ronny A.P. Situmorang

Penyunting

Kristianto
Santjojo Rahardjo
Emah Salomi Suebu
Duly Apika Sari
M. Azis Antony

Desain Grafis

Antonius Angkawijaya
Subhan

Sekretariat

Teddi Hadian Ruswandi
Nina Tri Rahmiyanti
Rika Utari

Pembuat Artikel

Rizky Fauzia
Fitri Aminatul Azizah
Kristianto
Putri
Fatimah
Santjojo Rahardjo
Satya
Tri Wulandari Henny Astuti
Vin Mamarodia
Rian Anthony
Toma Afriandi/ Maulita Oktaviani
Risna Yulida
Ario Suhendra
Dadang
Chathiyana Fafilaya
Tim Media Center BKKBN Aceh
Tim Humas BKKBN Maluku

Fotografer

Muhammad Rinualdy
Vivaldi Maulana Zhafran
Samidi



bkkbnofficial



@BKKBNOfficial



@BKKBNOfficial



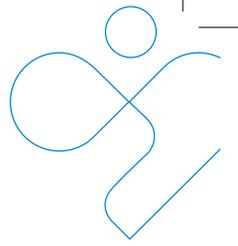
BKKBNOfficial



BKKBNOfficial



<http://www.bkkbn.go.id>



KONTRASEPSI

Hari Kontrasepsi Sedunia. Dunia mengenalnya sebagai *World Contraception Day*. Diperingati setiap 26 September sejak 2007 lalu, Hari Kontrasepsi memang kalah pamor dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas), atau hari-hari nasional lainnya.

Namun, sejujurnya, dibalik setiap peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, ada pesan kuat yang ingin disampaikan bahwa pengendalian penduduk adalah sesuatu yang vital. Khususnya bagi negara berkembang dengan jumlah penduduk yang membludak dan kesejahteraan yang rendah.

Optimisme naiknya kesejahteraan tak akan pernah terealisasi manakala keluarga memiliki anak banyak dengan dukungan finansial yang lemah. Negara pun tak kan mampu banyak berbuat kala hasil-hasil pembangunan dimakan habis oleh penduduk yang berlimpah.

Beruntung. Kesadaran Indonesia akan bahaya itu telah muncul pada awal 1970. Kala itu, pemerintah bergagas membentuk lembaga negara bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional saat UU No. 52 Tahun 1999 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hadir. Akronim lembaga ini tak berubah, tetap BKKBN.

Melalui program KB yang digenjut masif kala itu, Indonesia setidaknya berhasil mencegah atau “menghemat” kelahiran sekitar 80 juta jiwa selama tiga dekade sejak program KB diluncurkan.

Prestasi itu berhasil diraih berkat kemampuan Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB. Dibalik program KB memang ada dukungan alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Kini, garapan besar sedang ditangani bangsa ini. *Stunting*. Kegagalan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan energi kronis (KEK) ini bakal

menghambat perkembangan bangsa dan negara manakala tidak ditangani serius dan benar.

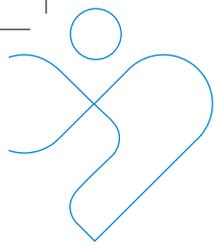
Tampak di permukaan bahwa *stunting* berkaitan dengan persoalan asupan gizi, pola asuh, dan lingkungan yang tak layak. Namun dibalik itu semua, ada satu komponen yang juga sangat memengaruhi muncul tidaknya *stunting* pada anak. Kita mengenalnya dengan istilah 4T.

4T adalah Terlalu muda melahirkan. Terlalu Tua melahirkan. Terlalu dekat jarak kelahiran (*spacing*) dan Terlalu banyak anak.



Program KB mendominasi agar 4T tersebut dapat dikendalikan. Ini berarti bahwa kontrasepsi sebagai bagian dari program KB mengambil peran besar dalam upaya bangsa ini melakukan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

Maka, bila peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 digegapgempitakan oleh BKKBN bersama peran mitra kerja dan masyarakat, menjadi pertanda bahwa sesungguhnya bangsa ini sangat komit terhadap upaya pencegahan *stunting* menuju Indonesia Emas 2045, melalui berbagai cara. Salah satunya memasifkan pemakaian alokon. ■



Kepala BKKBN Minta Penurunan *Stunting* di Sultra Fokus di 6 Kabupaten

■ Penulis: Rizky Fauzia

JAKARTA, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) meminta upaya penurunan *stunting* fokus di 6 kabupaten dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam waktu dua tahun terakhir Provinsi Sulawesi Tenggara memang berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* dari 31,4% menjadi 27,7% data hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Namun ada beberapa daerah yang masih perlu perhatian khusus.

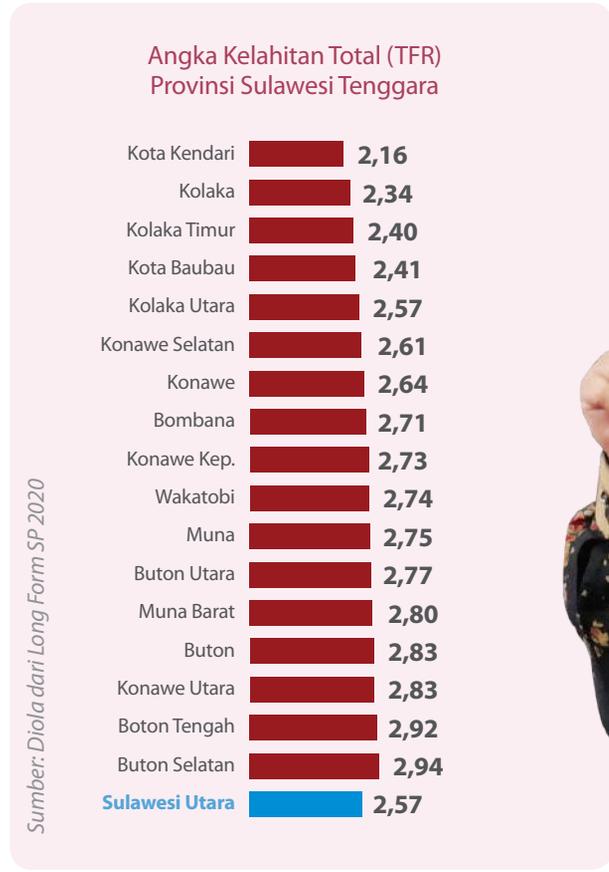
“Untuk Konawe, Muna, Bombana, kemudian Wakatobi, kemudian Buton Utara, dan Muna Barat, perlu mendapat perhatian karena tempat-tempat tersebut

*stunting*nya meningkat dan juga tentu ditambah Buton Tengah, Buton Selatan, di mana angkanya masih jauh di atas 30 persen, bahkan Buton Tengah 41 persen,” kata Kepala BKKBN-RI dokter Hasto Wardoyo saat memberikan sambutannya pada acara Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring melalui zoom *meeting* Kamis (14/09/2023).

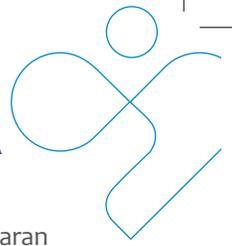
Menurut dokter Hasto, rata-rata jumlah anak dan jarak kelahiran memengaruhi *stunting* seperti di Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Buton, Muna, dan Buton Utara yang masih memiliki *total fertility rate* (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang tinggi.

Dokter Hasto berharap tim BKKBN lebih keras lagi melayani kontrasepsi di wilayah tersebut. Dengan begitu bila TFR-nya atau rata-rata perempuan melahirkan akan berkurang, *stunting*nya otomatis akan menurun. Begitu pula tingginya pernikahan usia muda.

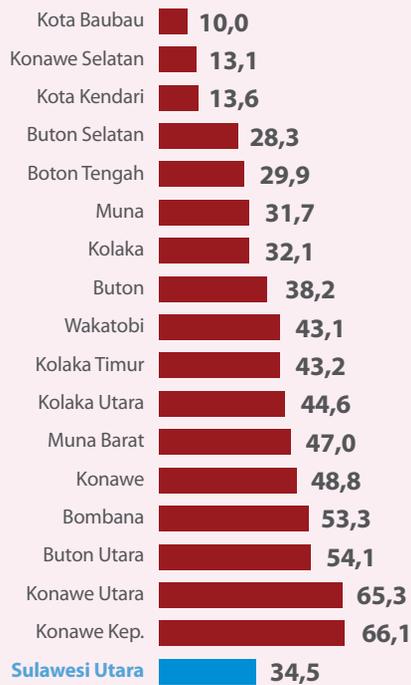
“Begitu juga kawin usia muda itu yang sudah melahirkan di usia 15-19 tahun, itu di Konawe, Kepulauan itu 66 orang per



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).



**Angka Tingkat Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun)
Provinsi Sulawesi Tenggara**



Sumber: Diola dari Long Form SP 2020

seribu. Di Konawe Utara 65 per seribu, Buton 54 per seribu dan seterusnya. Tentu di kota jauh lebih baik, seperti katakan Kota Baubau termasuk Konawe Selatan, Kota Kendari, ini juga sudah cukup baik karena angkanya cukup rendah. Inilah kerja keras untuk mencegah perkawinan usia muda juga sangat berpengaruh,” jelas dokter Hasto.

Selain itu dokter Hasto menjabarkan 4 skenario dalam pembelian makanan tambahan dalam rangka menurunkan *stunting*. Satu adalah menggunakan dana DAK Kementerian Kesehatan, dua menggunakan dana desa, tiga yaitu menggunakan dana PKH dari program Keluarga Harapan di Dinas Sosial.

Dan yang keempat adalah bersumber dari Bapak Asuh Anak *Stunting*, kemitraan dari swasta atau *pentahelix*.

Senada hal itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bidang Pembangunan Berkelanjutan drg. Agus Suprpto, M.Kes yang juga hadir secara virtual pada acara tersebut mengatakan bahwa selain Bapak Asuh Anak *Stunting* tapi juga difokuskan kepada Bapak Asuh bagi para Ibu Hamil.

“Kita mesti fokus kepada subjeknya siapa, pak walikota sudah menyebutkan bahkan pak walikota merupakan bapak asuh anak *stunting*, tapi saya harap ada juga bapak asuh anak *stunting* tapi juga ada bapak asuh ibu hamil *stunting*. Secara keilmuan sudah selesai,

kebijakan dan juga anggaran, jadi harus fokus sasaran itu pada siapa, lebih terdahulu diutamakan, anak remaja, ibu hamil, dan sebagainya harus diselesaikan. Kemudian konvergensi semua anggaran apakah tepat pada sasaran, tidak hanya tingkat di kabupaten tapi apakah di desa demikian,” terangnya.

Roadshow *Stunting*

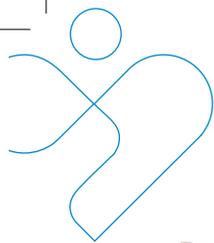
Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Johannes Robert mengatakan penurunan *stunting* di Sulawesi Tenggara berkat *roadshow* yang dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota di provinsi tersebut.

“Dari 17 kabupaten/kota sudah melakukan beberapa inovasi terkait upaya penurunan *stunting*, sebagaimana kita sudah melihat datanya, bahwa kurun waktu 2 tahun terakhir kita sudah bisa menurunkan angka *stunting* dari 31,4% jadi 27 koma sekian persen. Artinya intervensi dari inovasi yang dilakukan teman-teman provinsi/kabupaten sudah memperlihatkan hasil hanya saja memerlukan kerja keras dari angka 27% dengan sisa waktu kurang 1 tahun 4 bulan kita harus menurunkan di 14 persen,” kata Johannes Robert.

“Saya pikir ini target yang sangat fantastis, mungkin harapan kami bisa menurunkan sampai dengan angka 20%. Ada beberapa rencana tindak lanjut yang secara garis besar kami sampaikan, secara keseluruhan kurang lebih ada 30 rencana tindak lanjut yang sudah dirumuskan pasca *roadshow* yang paling penting yang utama perlu disampaikan adalah terkait dengan upaya kita bagaimana mengoptimalkan peluang atau potensi pendanaan dalam rangka intervensi *stunting* di level pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, dan di ujung tombak di pemerintah desa. Satu upaya yang telah kita lakukan adalah bagaimana agar dana desa dapat dioptimalkan menjadi sebagian masyarakat desa untuk mengintervensi *stunting*. *Alhamdulillah* dalam perkembangannya pasca *roadshow*, ada beberapa kabupaten yang sudah memfasilitasi desanya untuk mengalokasikan dana desa dalam rangka percepatan penurunan *stunting*,” lanjut Johannes.

Menurut Johannes, pasca *roadshow* beberapa kabupaten telah membuat kebijakan dengan menetapkan SK untuk Tim Pendamping Keluarga yaitu Kota Baubau, Konawe, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Selain itu kekurangan sarana prasarana seperti alat ukur antropometri menjadi salah satu alasan mengapa *stunting* di Sulawesi Tenggara tidak terdeteksi lebih dini, tutupnya.

Editor: Kristianto



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Harris Pontianak pada Sabtu (9/9/2023).

Revolusi Makan Ikan

Untuk Optimalkan Bonus Demografi & Percepat Turunkan *Stunting*

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

PONTIANAK, BKKBN - Saat ini Indonesia memiliki Bonus Demografi karena pertumbuhan penduduk yang terkendali. Bonus demografi ini bisa berlanjut bahkan setelah *dependency ratio* naik, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan, dan produktif.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan tema “Penguatan TPPS dan Mitra Kerja dalam Percepatan Penurunan *Stunting*” di Hotel Harris Pontianak pada Sabtu (9/9/2023).

Hadir dalam acara ini Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Drs. Alfian Salam, M.M, Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Barat Dr. H. Muhajirin M.Pd.i, Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT, Wakil Walikota Bahanan, SH, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dr. Sartiko, M.Med PH.

Hadir juga Dandim 1207 Pontianak Letkol Arm

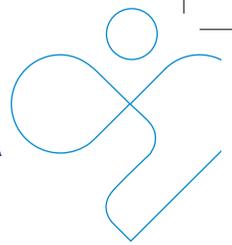
Irwansyah, S.A.P, Wakil Ketua DPRD Dr. Firdaus Zarin, para anggota dan ketua DPRD Kalbar, Forkompinda Kota Pontianak, Tim Pendamping Keluarga, para kader, dan Penyuluh KB.

Dokter Hasto menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi. “Pak Presiden mengingatkan kita bahwa era bonus demografi harus dimanfaatkan karena kesempatan Kalimantan Barat itu pendapatan perkapitanya meningkat,” kata dokter Hasto.

“Karena orang *stunting* itu pendapatan rata-ratanya 20 persen lebih rendah dibandingkan orang yang tidak *stunting*, karena dia tidak cerdas tidak tinggi dan mudah kena penyakit. Jadi kalau kita ingin sejahtera dan makmur di era bonus ini *stuntingnya* harus idealnya di bawah 14 persen,” imbuhnya.

Dokter Hasto menyebutkan bahwa Kota Pontianak menjadi contoh yang hebat. “Karena penurunan angka *stuntingnya* dari 24,4% menjadi 19,7%. Sedangkan untuk menurunkan 5% itu tidak mudah, oleh karena itu kami apresiasi kepada Kota Pontianak yang menjadi contoh untuk penurunan *stunting* di Kalimantan Barat,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto menekankan pentingnya memberikan nutrisi yang optimal sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan



demis cegah *stunting*, ia menyebutkan bisa dengan bahan yang mudah dan murah, dirinya terinspirasi dari revolusi makan ikan di Jepang, “Di Kalbar ikan cukup banyak, telur mudah, sehingga telur dan ikan murah, lele juga bagus. Antara lele dan daging sapi lebih bagus lele untuk ibu hamil dan balita. Karena lele mengandung omega-3 sementara daging sapi itu tidak mengandung banyak omega-3,” kata dokter Hasto, lalu ia menambahkan, “tapi kadang-kadang Pak orang punya hajat itu kalau nggak pakai daging merasa gengsi coba ibu bapak yang punya hajat di Kalbar dibikinkan semur lele,” saran dokter Hasto.

Selain masalah nutrisi, Hasto juga menyebutkan mengenai kualitas air bersih yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya *stunting*. “Air minum itu pengaruhnya sangat besar, di data kami, terdapat 3 kecamatan yang memiliki sumber air tidak layak, yaitu Pontianak Timur, Pontianak Utara, dan Pontianak Barat,” papar dokter Hasto.

Keluarga Sasaran

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M menjelaskan kondisi *stunting* di Kalbar. “Saat ini prevalensi *stunting* di Provinsi Kalimantan Barat menurut SSGI Tahun 2022 cukup tinggi yaitu sebesar 27,8% walaupun ada penurunan sebesar 2% di tahun 2021. Kita terus berupaya dengan menggerakkan semua potensi yang ada untuk turunkan angka *stunting* menjadi 14% sebagaimana target nasional yang sudah diamanatkan oleh Presiden,” jelasnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa di setiap kabupaten kota di Kalbar seluruh TPS sudah dibentuk. “Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022 ada 1 juta lebih keluarga di Provinsi Kalimantan Barat, 704.000 keluarga tersebut adalah keluarga sasaran kita, dan 466.000

keluarga tersebut adalah keluarga beresiko *stunting*,” ujar Pintauli. “Saat ini hasil laporan TPPS semester pertama memang belum menggembirakan masih banyak PR yang harus kita hadapi dengan beberapa keterbatasan sebagai tantangan,” kata Pintauli.

Pih Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Drs. Alfian Salam, M.M, mengatakan bahwa upaya untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif dimulai dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Kalimantan Barat, “Agar apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menghasilkan generasi ke depan yang bebas *stunting*, kita akan lebih baik dimasa mendatang. Semoga dapat kita lebih fokuskan pada upaya promotif dan preventif secara terintegrasi,” harap Alfian.

Senada dengan Alfian, Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM., MT., menjelaskan bahwa sejak digaungkan *stunting* di kota Pontianak dirinya telah berkoordinasi bersama seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintahan, non kementerian dan lembaga TNI Polri, “Kami turun langsung ke bawah untuk mendata terutama yang kita data adalah anak-anak balita, yang kedua ibu hamil, sehingga kita berupaya untuk melakukan jemput bola di lapangan terhadap ibu hamil yang kita rasa rentan terhadap terjadinya masalah *stunting*,” ujar Edi.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

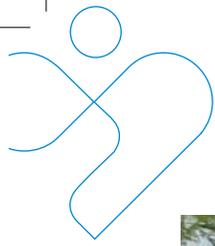
Editor: Kristianto



Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar dengan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) menerima plakat.



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menebar bibit lele pada sosialisasi percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Dokter Hasto: Ikan Lele untuk Cegah *Stunting*

■ Penulis: Kristianto

SEMARANG, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mendorong masyarakat mengonsumsi ikan lele untuk mencegah *stunting*.

“Kalau menyuapi makan anak, jangan hanya mie saja atau nasi dengan kerupuk. Harus ada protein hewani yaitu ikan lele. Ikan lele ini protein hewannya cukup tinggi. Jadi bisa mencegah *stunting*,” kata dokter Hasto kepada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (10/09/2023).

Sosialisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora diinisiasi anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto itu dihadiri Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih.

Menurut dokter Hasto, selain mengandung protein hewani yang cukup tinggi, ikan lele juga harganya murah dan mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Kandungan protein hewani ikan lele menurut dokter Hasto lebih tinggi dibandingkan daging sapi.

Dokter Hasto juga berdialog dengan warga dan menanyakan berapa harga ikan lele per kilogramnya.

“Ikan lele Rp23 ribu per kilonya Pak. Kalau telur Rp26 ribu per kilo,” kata warga.

Selanjutnya dokter Hasto dan anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menebarkan benih ikan lele untuk dibudidayakan di rumah-rumah warga. “Ikan lele ini untuk mencegah *stunting*. Masyarakat bisa memanen ikan lele dari halaman rumah sendiri,” ujar dokter Hasto.

Bantuan benih ikan lele diberikan di halaman rumah Supriyono yang memiliki anak *stunting* berusia 3 tahun.

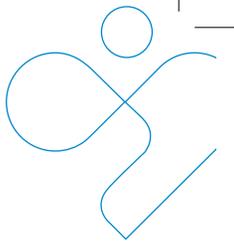
Prevalensi *stunting* di Kabupaten Blora mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi 21,5 persen dan pada 2022 menjadi 25,8 persen.

Karena itu, anggota Komisi IX Edy Wuryanto berinisiasi menggelar Gotong Royong Penanganan *Stunting* di Kabupaten Blora.

Sebelum menaburkan benih ikan lele, dokter Hasto mengunjungi Puskesmas Jepon dan memasang alat kontrasepsi kepada 22 akseptor KB yang menggunakan implan sebanyak 13 orang dan 9 orang IUD.

Rangkaian sosialisasi penanganan *stunting* di Kabupaten Blora dipusatkan di Lapangan Kridosono. Hadir dalam sosialisasi itu lebih dari 5 ribu orang.

Editor: Annisa H



Potensial Tangani *Stunting*

BKKBN Ikut Galakkan Kampanye Makan Ikan

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

JAKARTA, BKKBN – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satunya di bidang kelautan, dengan potensi hasil perikanan yang melimpah. Sektor tersebut dituntut untuk mampu memecahkan masalah utama bangsa, seperti pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, termasuk penanganan *stunting*.

Kampanye gemar makan ikan sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* turut digalakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), terdapat tujuh provinsi yang masih berada di bawah angka konsumsi gemar makan ikan nasional, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, NTT, Kalimantan Barat, dan NTB. Provinsi-provinsi tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan.

“Jadi, di daerah pesisir dan perbatasan, ikan itu banyak. Itu yang didorong, di samping juga ada ikan daratan seperti lele, lele murah dan mudah didapat”, ujar drg. Widwiono, M.Kes, Penyuluh KB Ahli Utama yang hadir mewakili Kepala BKKBN dalam Seminar Nasional dengan Tema “Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju” yang diselenggarakan Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Dirinya menyebutkan untuk menurunkan angka *stunting*, disamping memanfaatkan makanan pokok lokal, BKKBN juga mengutamakan protein hewani, seperti telur dan ikan. “Anak umur 2-5 tahun baiknya ditambahkan dua telur. Alangkah baiknya jika masyarakat di daerah pesisir atau laut mengonsumsi sepotong ikan,” ujarnya.

Widwiono mengatakan bahwa asupan protein hewani tersebut penting untuk dipenuhi pada anak mulai dari enam sampai 24 bulan.

“Di daerah pesisir banyak ikan. Kalau bisa konsumsi satu ekor ikan itu malah lebih bagus banget,” ucap Widwiono. Ia optimis apabila masyarakat membiasakan diri untuk mengonsumsi ikan, akan berdampak sangat besar bagi penurunan angka *stunting*.

Lebih lanjut, ia berharap dengan digalakkannya kampanye gemar makan ikan, angka *stunting* 14 persen



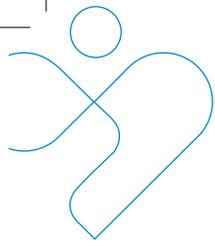
Penyuluh KB Ahli Utama, drg. Widwiono, M.Kes.

di tahun 2024 nanti akan sukses dicapai. “BKKBN terus menggenjot sosialisasi perubahan perilaku dan aksi nyata di daerah. Jika hal ini bisa digencarkan, *stunting* bisa turun,” pungkasnya.

Dalam seminar tersebut, hadir narasumber Dr. (H.C.) Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan era 2014-2019, yang mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan untuk para nelayan. Susi yakin jika nelayan sejahtera (ada bantuan modal usaha), maka masyarakat di sekitar pesisir tidak lagi kekurangan ikan yang merupakan sumber utama protein untuk menurunkan angka *stunting*.

Susi menilai ikan di perairan Indonesia lebih banyak dijual ke negara lain, dibandingkan yang dikonsumsi masyarakatnya sendiri, khususnya masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan masih tidak sejahteranya taraf hidup nelayan di tanah air. Sehingga mereka lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya dibandingkan dikonsumsi sendiri.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kunjungi Aceh Ini Pesan dr Hasto Terkait *Stunting*

■ Penulis: Tim Media Center BKKBN Aceh

BANDA ACEH, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), Senin, (11/9/2023), tiba di Kota Banda Aceh, dalam rangka menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, oleh Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

Tiba dari bandara Sultan Iskandar Muda, sekitar pukul 13.20 WIB, dokter Hasto yang didampingi Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, dr. Victor Palimbong, disambut para pejabat Penata KKB Ahli Madya di teras Kantor Perwakilan BKKBN Aceh.

Di aula lantai 2, kantor Perwakilan BKKBN Aceh di Jl. T. Nyak Arief, Lampineung, Banda Aceh, sekitar seratusan lebih pegawai BKKBN Aceh, telah menunggu kehadiran dokter Hasto bersama rombongan.

Dokter Hasto menyampaikan beberapa pesan Arah Kebijakan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam kerangka kegiatan pembinaan ASN di lingkungan internal.

“Kita harus memahami apa-apa saja program kerja kita. Kalau kita sudah memahaminya, akan mudah bagi kita menyampaikan kepada masyarakat, *stakeholder*, dan mitra kerja. Tujuan akhir dari program kerja kita, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan keluarga berkualitas,” tegasnya.

Menurut dokter Hasto, menjadi pelayan masyarakat yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Mengenyampingkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan melayani masyarakat, integritas.

Sekarang, kata dokter Hasto, ada penyakit gangguan mental emosional, di mana dari 100 ASN, ada enam orang yang ‘terganggu’ mentalnya, stres ringan. Sering bolos kerja tetapi absennya rajin, tidak bertanggungjawab dengan pekerjaannya, kerjanya suka menyalahkan, dan *ngeyel* (red: *batat* di Aceh). “Kita harus menjadi personal



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

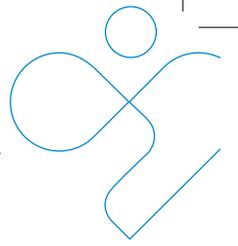
master, bekerja dengan cerdas dan ikhlas. Kalau ada yang memancing emosional, diamkan aja. Mengalah, agar tidak dapat dikalahkan,” nasihatnya.

Selesai berdialog dan berdiskusi singkat, Kepala BKKBN RI, bersama rombongan menuju Pendopo Gubernur Aceh, mengikuti acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim.

Pada kesempatan tersebut, selesai pengukuhan oleh Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Kepala BKKBN RI, dokter Hasto, memaparkan materi “Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*” di depan tamu undangan yang hadir. Ada kepala dinas, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Aceh, PKK, dan mitra kerja lainnya.

Visi Indonesia pada 2045, kata dokter Hasto, adalah generasi emas. Rentang waktu 2020 hingga 2045, sebutnya, 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif, 15 hingga 64 tahun. Target SDGs 2030, jelasnya, menghilangkan kelaparan dan mengurangi risiko kekurangan gizi. Mengurangi rasio angka kematian ibu, menurunkan angka kematian neonatal dan akses kesehatan reproduksi yang universal.

“Keluarga muda berkualitas kunci Indonesia Emas. Bapak dan ibu, pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Tahun 2025-2035, merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikopitalisasi,” kata dokter Hasto.



Selanjutnya, ia mengatakan, keluarga sehat, produktif, dan berkualitas adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kata dia, generasi milenial dan post milenial adalah sasaran utama Program Bangga Kencana. Maka, pola komunikasi harus berubah.

“Program Bangga Kencana bukan semata-mata KB, namun membangun keluarga secara utuh dalam berbagai dimensinya. Sementara saat ini Indonesia sedang dihadapi persoalan *stunting*. Dan Aceh, provinsi tertinggi ketiga di Indonesia pada 2022 –hasil SSGI, prevalensi *stunting* sebesar 31,2 persen. Pada 2021, 33,2 persen, menurun dua digit,” sebutnya.

Target Presiden menurunkan angka *stunting* 14% pada tahun 2024 merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan bersama. “Bapak Gubernur, BKKBN menyediakan sebanyak 22.410 Tim Pendamping Keluarga, terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka sebagai garda terdepan membantu mencegah *stunting* di Aceh dari hulu ke hilir. Mereka tersebar di 6.000 lebih desa. Manfaatkan mereka, mereka juga sudah kita latih,” kata dokter Hasto.

Usai mengikuti pengukuhan, malam nya, dokter Hasto menuju kegiatan Pengembangan BKB CoE Tingkat Provinsi di Hotel Oasis Banda Aceh. Pada kegiatan yang diikuti PKK, OPD KB, Penyuluh KB, Keuchil/kepala desa, dan bidan tersebut, Kepala BKKBN didampingi Kaper Safrina Salim menitipkan pesan tentang pentingnya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Aceh.

“Penurunan *stunting* bisa kita lakukan, apalagi pencegahannya. Kita lihat dan baca grafik, daerah yang persentasenya yang tidak memiliki jamban atau jamban

tidak layak, sumber air tidak layak minum, rumah tidak layak huni, kemiskinan ekstrim, itu semua ada kaitan sama daerah-daerah yang tinggi *stuntingnya*.”

“Intervensi masalahnya di tempat-tempat tinggi tersebut, maka akan turun di bawah 30 persen (angka *stuntingnya*). Nanti yang lainnya, yang kecil-kecil itu mengikuti,” ucapnya.

Sumber air minum tidak layak huni tertinggi di Bener Meriah sebesar 23,53%, Aceh Tengah 17,54%, dan Simeulue 13,26%. Sementara Jamban tidak layak tertinggi di Gayo Lues 36,36%, Pidie 32,02%, Aceh Barat Daya 26,24%. Sedangkan rumah tidak layak huni tertinggi di Gayo Lues sebesar 53,07%, Pidie 50,30%, Aceh Tenggara 49,30%.

“Daerah-daerah ini adalah kabupaten tertinggi kasus *stuntingnya*. Jadi, tuntaskan masalahnya, akan turun kasus *stuntingnya*,” pungkas dokter Hasto.

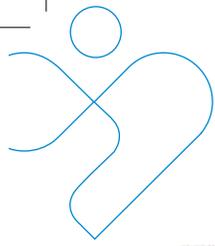
Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Produktifitas dan daya saing. Anak *stunting*, jangka pendeknya, terganggu perkembangan otaknya, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh si anak.

Jangka panjang, anak *stunting* akan menurun kemampuan kognitif dan presentasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit dan meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke serta disabilitas pada usia tuanya.

Editor: Santjojo Rahardjo



Acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh yang dihadiri Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan pejabat setempat.



Zoom Meeting

Humas Fitri Am...
BKKBN_Dian
SM FoodCycle
BKKBN_Dian
Sakti - Winda Lianita
Mila Dinda R...

Food Waste Facts



2.13 Million Tons
of food wasted in Jakarta per
annum
Kompas.id, 2022

1,817 Meters
of Jakarta's food waste
exceeds the world's tallest
skyscraper **Burj Khalifa**
Kompas.id, 2022

**Rp 2.1 million /
US\$142**
worth of food wasted for each
Indonesian per year in average
Kompas.id, 2022

foodcycle

BKKBN Sambut Baik *FoodCycle* Indonesia Bantu Percepat Turunkan *Stunting*

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

JAKARTA, BKKBN - Dalam era *sustainable food* yang tengah marak digalakan saat ini, turut menggugah sebagian orang untuk sadar dan peduli terhadap pengolahan makanan.

Penting sekali untuk mampu mengolah makanan secara optimal dengan sebisa mungkin meminimalkan limbah.

Namun, perilaku membuang atau menyisakan makanan masih kerap terjadi bahkan dianggap sepele bagi banyak orang.

Hal inilah yang turut menjadi perhatian *FoodCycle* Indonesia saat melakukan audiensi dengan Kepala BKKBN secara daring pada Jum'at (22/09/2023).

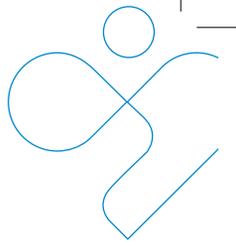
FoodCycle Indonesia merupakan organisasi yang berfokus pada gerakan pencegahan *food waste*. Organisasi nirlaba tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya audiensi adalah untuk bekerja sama

menyalurkan bantuan makanan berlebih yang mereka kumpulkan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) menyambut baik usulan kerja sama ini.

"Kami siap memfasilitasi dengan menyediakan data-data sasaran berupa anak risiko *stunting* dan ibu hamil yang membutuhkan bantuan. Alangkah baiknya kalau bantuan tersebut diberikan selama 6 bulan, nanti kita bisa lihat perkembangannya secara terukur," ungkap dokter Hasto.

Dokter Hasto mengatakan BKKBN juga siap untuk memilihkan lokus pemberian bantuan dengan memilih daerah yang angka *stunting*nya masih tinggi. Maka dari itu, BKKBN sangat mengapresiasi dukungan dari *FoodCycle* Indonesia dalam rangka ikut serta berperan aktif menurunkan angka *stunting*.

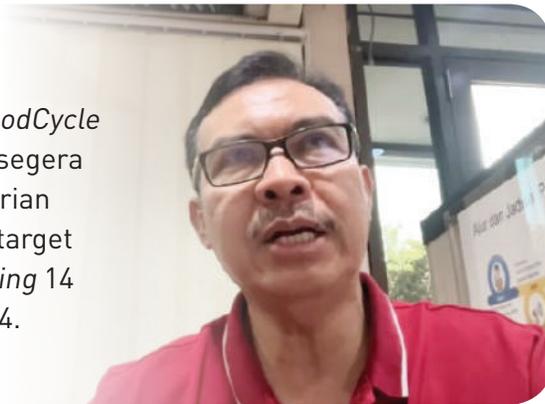


“Bantuan yang diberikan bukan berarti makanan sisa ya, tetap yang layak konsumsi. Saya mengusulkan bantuan makanannya nanti yang mengandung unsur pencegahan *stunting*, contohnya seperti ikan dan telur,” kata dokter Hasto menambahkan.

Selain bantuan berupa makanan, *FoodCycle* Indonesia direncanakan akan membagikan secara gratis multivitamin kepada 700 ibu hamil, namun jumlah ini bisa jadi akan lebih mengingat banyaknya sasaran yang masih membutuhkan bantuan.



Dokter Hasto berharap *FoodCycle* Indonesia dapat dengan segera melaksanakan pemberian bantuan ini, mengingat target pencapaian angka *stunting* 14 persen di tahun 2024.



Mengamini hal tersebut, General Manager *FoodCycle* Indonesia Tri Sandi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim agar dapat memberikan bantuan seoptimal mungkin.

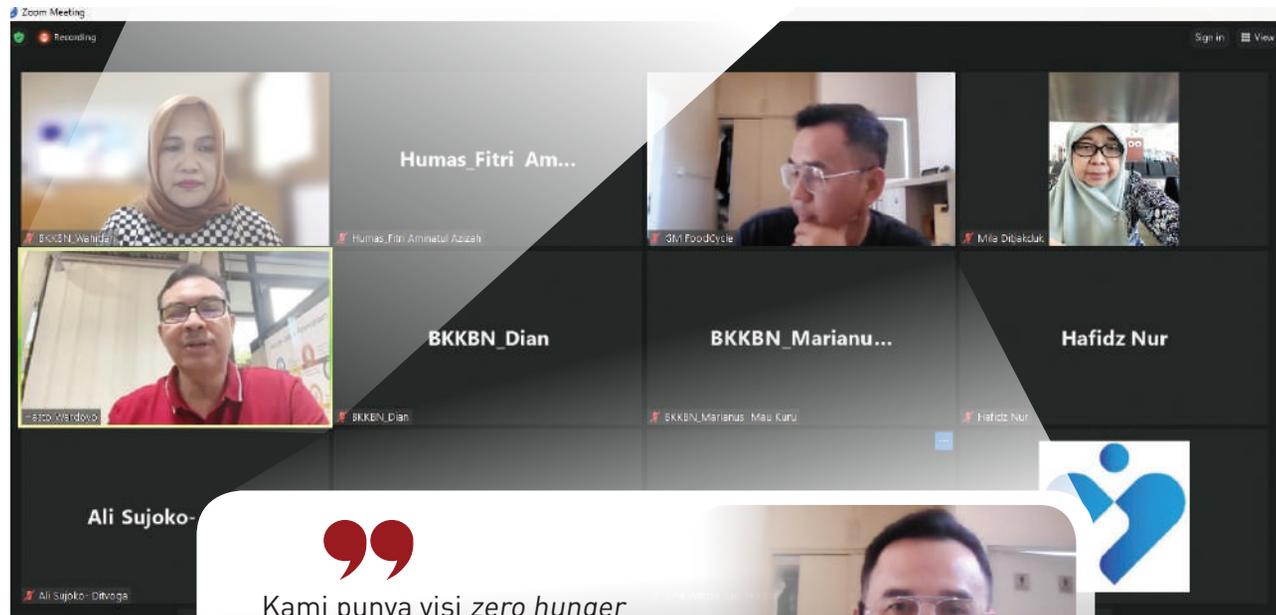
“Paket bantuan pangan tersebut disalurkan atas kerjasama dan kolaborasi kami dengan banyak pihak dari perusahaan, mitra, dan para donator baik internasional maupun regional. Kita tetap sortir makanan yang *edible* dan layak konsumsi,” kata Tri Sandi.

Lebih lanjut Tri Sandi menjelaskan mengenai organisasi nirlabanya. “Kami punya visi *zero hunger* untuk Indonesia yang lebih baik, *FoodCycle concern* terhadap masalah *food waste*, misal di Jakarta sendiri memiliki 2,1 juta ton *food waste* per tahun. Oleh karena itu, kita melakukan *food rescue*, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan jangan sampai dibuang,” jelas Sandi.

Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah melihat potensi dalam organisasi nirlaba ini mirip seperti *foodbank*, dirinya siap untuk menyiapkan MoU antara BKKBN dengan *FoodCycle* Indonesia sebagai dasar untuk melaksanakan tindak lanjut.

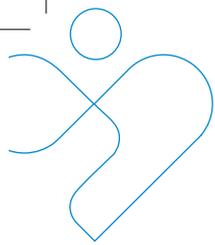
“Segera kita adakan rapat lanjutan untuk menyusun rencana aksi dan teknis pelaksanaannya,” ucap Wahidah.

Editor: Kristianto



Kami punya visi *zero hunger* untuk Indonesia yang lebih baik, *FoodCycle concern* terhadap masalah *food waste*





Kukuhkan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Jadi Duta BAAS

■ Penulis: Rizky Fauzia

BANDUNG, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengukuhkan Ketua Umum Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Rahma Dudung Abdurachman menjadi Duta Bunda Asuh Anak *Stunting* pada Kamis (14/09/2023) malam di Markas Kodam III/Siliwangi di Kota Bandung.

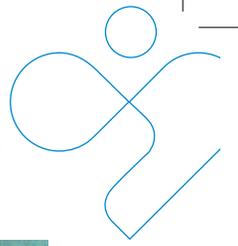
Pengukuhan dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan sejumlah pejabat baik sipil maupun militer.

Kepala BKKBN dokter Hasto mengatakan pengukuhan Ketua Umum Persit KCK itu terus memperkuat kolaborasi upaya percepatan penurunan *stunting*.

“Dengan dikukuhkannya Ibu KSAD atau Ketua Umum Persit kan *stunting* itu jadi inklusif ke semua lini. Sebetulnya fungsi keluarga itu sendiri kan juga ada fungsi budaya, ada fungsi lingkungan ada ekonomi, pendidikan, jadi kalau menurut saya *stunting*”



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengukuhkan Ketua Umum Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Rahma Dudung Abdurachman menjadi Duta Bunda Asuh Anak *Stunting* didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.



Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Rahma Dudung Abdurachman menjadi Duta Bunda Asuh Anak *Stunting*.

itu harus masuk ke semua lini seperti hari ini,” kata dokter Hasto kepada awak media usai pengukuhan yang juga dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan.

Pengukuhan Rahma yang juga istri Jenderal TNI Dudung Abdurrachman atas dasar partisipasi aktif dan komitmen yang baik dalam mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Menurut dokter Hasto, saat ini yang berpartisipasi menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting* sudah banyak. “Dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apindo, jumlah yang menjadi Bapak Asuh dan Bunda Asuh lebih dari 1.000 orang. Kemudian semua pegawai Pemerintah Provinsi NTB dan Aceh, TNI, Polri, dan mitra lainnya. Di Jawa Barat sendiri didukung oleh NGO dan beberapa negara lainnya,” ujar dokter Hasto.

Karena itu dokter Hasto menyatakan optimisme *stunting* di Jawa Barat pada tahun 2023 bisa mencapai 17%. Strateginya menurut dokter Hasto adalah dengan menghadang di hulu atau para calon pengantin.

“Harapan saya itu segera dihadang jadi semua yang mau nikah yang mau hamil itu diselamatkan dulu. Karena kita tahu sekarang ini remaja putri yang anemi kan 20%. Kalau yang mau nikah yang anemia ini 20% jadi itu berkontribusi jadi melahirkan anak *stunting*. Kan itu strategi yang harus dilakukan. Karena yang mudah hamil itu kan mereka yang muda-muda,” ujar dia.

“Contoh yang menjadi tantangan di Jawa Barat kan

misal pernikahan dini, *unwanted pregnancy* (kehamilan yang tidak dikehendaki), kemudian orang yang sudah hamil kemudian melahirkan usia 15 sampai 19 tahun itu menjadi tantangan sekarang ini yang perlu kita fokuskan. Untuk sedikit ke hulu,” kata dokter Hasto.

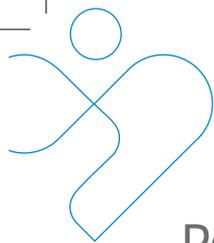
Sementara itu Jenderal TNI Dudung Abdurrachman dalam sambutannya mengatakan untuk selalu mendukung program-program pemerintah khususnya percepatan penurunan *stunting*.

“Nanti ada pengukuhan Bunda Asuh Anak *Stunting* oleh Kepala BKKBN. Mari kita jalin kerjasama merajut kebangsaan, cinta tanah air dan masyarakat Jawa Barat saya punya keyakinan bahwa nilai-nilai kebangsaan tanah air dan bela negara masih terpatrit,” kata Jenderal Dudung Abdurrachman.

Program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2022 merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menjadi Bapak Asuh atau Bunda Asuh bagi keluarga berisiko *stunting*, khususnya pada fase 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Selain penobatan BAAS, dalam acara ini terdapat deklarasi kebangsaan, penobatan Bapak Asuh Kebangsaan oleh Pj Gubernur Jawa Barat dan Pj Gubernur Banten, penobatan Bapak Asuh Budaya, penyerahan senjata dari Pangdam III/Siliwangi kepada Kasad, penyerahan piagam prestasi Persit dan pembagian sembako.

Editor: Kristianto



Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023

BKKBN Tingkatkan Pemakaian Kontrasepsi Modern untuk Turunkan Angka Kematian Bayi

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

JAKARTA, BKKBN - Keberhasilan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup.

Angka kematian bayi di Indonesia sudah menurun dari 145 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk (SP) tahun 1971 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup pada SP tahun 2010. Saat ini angka kematian bayi menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup hasil Long Form SP 2020.

“Menurunkan angka kematian bayi dilakukan dengan peningkatan pemakaian KB, khususnya untuk KB modern. Kematian Ibu atau kematian bayi dapat disebabkan oleh jarak kelahiran yang terlalu dekat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka KB Pascapersalinan terus ditingkatkan khususnya untuk MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) yang lebih efektif,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau *World Contraception Day* tahun 2023, Selasa (26/09/2023).

Acara peringatan yang digelar di auditorium kantor BKKBN pusat di Jakarta itu sekaligus *kick off* Pekan Pelayanan KB berkolaborasi dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia yang dimulai 26 September hingga 4 Oktober 2023.

Dalam implementasi pelayanan KB di lapangan, BKKBN berkolaborasi bersama dengan TNI melalui penguatan dan percepatan pencapaian sasaran Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*.

“Dalam upaya akselerasi peningkatan capaian KB, diperlukan peran serta aktif dari jajaran TNI untuk membantu menggerakkan calon peserta KB dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas di Fasyankes



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) saat memberi sambutan pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

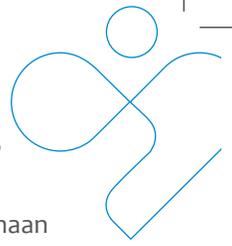
milik TNI atau Fasyankes lainnya,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto menyebutkan seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi dan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan target pelayanan KB sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota,

“Total target pelayanan KB dalam rangka Pekan Pelayanan KB Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 yang dimulai tanggal 26 September – 4 Oktober 2023 adalah sebanyak 1.484.747 akseptor,” papar dokter Hasto.

Oleh karena itu, dalam acara bertema “Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut dokter Hasto berharap capaian akseptor dalam momentum kali ini dapat dimaksimalkan.

“Saya juga mengingatkan kembali, agar dalam Pekan Pelayanan ini, seluruh tenaga yang terlibat dapat mendukung pemberian pelayanan KB yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB. Pemberian konseling yang komprehensif, serta pelayanan kontrasepsi yang mengedepankan



Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster TNI AD) Bidang Tahwil Komsos dan Bhakti TNI Brigjen TNI Taufik Shobri.

Prinsip Keluarga Berencana Berbasis Hak harus terus dilaksanakan,” ujar dokter Hasto.

Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Martin Suanta mengatakan bahwa kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini bertujuan untuk mensosialisasikan pada masyarakat terkait pentingnya kontrasepsi bagi perencanaan keluarga dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Martin juga menyampaikan harapannya akan kolaborasi lintas sektor yang kuat. “Perlu komitmen dan dukungan *stakeholder*, provider medis, dan mitra kerja untuk percepatan pencapaian program bangga kencana secara menyeluruh,” ujar Martin.

Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster TNI AD) Bidang Tahwil Komsos dan Bhakti TNI Brigjen TNI Taufik Shobri dalam kegiatan itu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala BKKBN yang menginisiasi gerakan pelayanan KB dalam momentum ini.

Brigjen Taufik menyoroti penurunan penggunaan kontrasepsi modern menurun dari 57,9 persen menjadi 57,2 persen.

“Salah satu penyebab utamanya adalah masih kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat khususnya pasangan muda akan pentingnya perencanaan keluarga dalam mempersiapkan pernikahan dan merencanakan kehamilan,” ungkap Taufik.

Menurut Taufik, hal ini memberikan dampak yang cukup besar dalam penanganan *stunting*. Melalui program keluarga berencana, merupakan langkah yang tepat untuk menekan angka *stunting*. “Program KB bertujuan untuk mengatur kehamilan PUS, mencegah usia kehamilan terlalu dini, dan mencegah jarak kehamilan terlalu dekat,” ucap Brigjen Taufik.

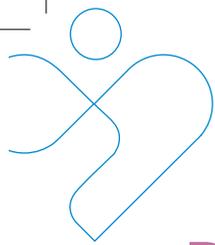
Brigjen Taufik mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan dan mengambil tindakan untuk penanganan *stunting* terutama pada 12 provinsi prioritas yang angka *stunting*nya masih tinggi.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kontrasepsi Sedunia ini untuk meningkatkan komitmen dan peran serta kita semua dengan bahu membahu bekerja sama untuk membantu pemerintah menurunkan *stunting* demi mewujudkan SDM berkualitas,” ajak Brigjen Taufik.

Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 juga dirangkaikan dengan Seminar “Peran KB dan Kespro dalam Penurunan *Stunting*”. Dalam seminar ini terdapat tiga narasumber yang memaparkan materinya yaitu Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp. OG, Subsp. FER, MPH, Int. Aff. RANZCOG., pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Nunik Endang Sunarsih, SST., SH., M.Sc, dan Kinshuk Kunwar. Seminar diadakan secara *hybrid* baik luring maupun daring dengan peserta dari Kementerian/ Lembaga, Mitra Kerja serta Masyarakat Umum.

Editor: Kristianto





Pemkab Taliabu Edukasi Pentingnya Makanan Bergizi Demi Cegah *Stunting*



Ketua TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu, Zahra Yolanda Aliong Mus saat mengikuti acara memasak makanan bergizi di program GEDOR.

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

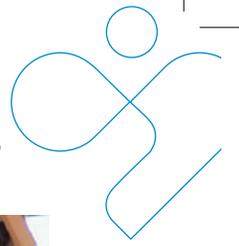
TALIABU, BKKBN – *Stunting* saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Hal ini karena berbagai daerah di Indonesia menghadapi masalah terkait *stunting*, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu.

Pulau Taliabu terletak di Maluku Utara. Hingga saat ini kabupaten tersebut belum memiliki akses penyeberangan yang nyaman. Di tengah kondisi tersebut, Taliabu justru mampu menekan angka *stunting* dari 35,2 persen pada 2022 menjadi 23,5 persen di 2023.

Guna menurunkan prevalensi *stunting* di daerah

itu, bekerjasama dengan Kompas.com, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menghadirkan acara *Talkshow* “Nyalakan Mimpi dengan Cukup Gizi”. Acara ini digandeng dengan acara memasak makanan bergizi di program GEDOR, berlangsung Jumat (29/9/2023), di Jakarta.

“Acara ini diselenggarakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya makanan bergizi demi mencegah *stunting*,” ujar Ketua TP PKK Kabupaten Pulau Taliabu, Zahra Yolanda Aliong Mus, menjawab pertanyaan



Talkshow "Nyalakan Mimpi dengan Cukup Gizi".

majalah Sahabat Keluarga, di sela-sela berlangsungnya acara.

Acara ini dihadiri Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, dengan memaparkan bahwa program KB berhasil mencegah pertumbuhan penduduk di Indonesia secara bermakna.

"Dewasa ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta jiwa. Kalau tidak ada KB, bertambahnya bisa 300 juta. Demikian halnya dengan *total fertility rate* (TFR) yang juga turun drastis. Jika tahun 1970 TFR mencapai 5,6, sekarang turun menjadi 2,14. Ini berarti satu keluarga paling banyak punya anak dua orang," jelas Sukaryo Teguh.

Keberhasilan ini setidaknya telah meredam melonjaknya prevalensi *stunting* di Indonesia. Antara KB dan *stunting* memang saling beririsan. Hal ini bisa dilihat dari indikator 4T (Terlalu dini menikah, Terlalu dekat jarak kelahiran, Terlalu Tua melahirkan, Terlalu banyak anak).

Program KB menjadi salah satu cara untuk menghindarkan ibu dari 4 Terlalu itu. Satu saja indikator tersebut tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut berpotensi masuk dalam kategori keluarga risiko *stunting*.

Sukaryo Teguh berharap keberhasilan yang sama segera terjadi juga pada program percepatan penurunan *stunting*. Digarap secara konvergensi dengan melibatkan banyak pihak, ia meyakini target 14 persen kasus *stunting* pada 2024 bakal dicapai.

Tahun 2021, prevalensi *stunting* di negeri ini sebesar 24 persen. Sekarang sekitar 21,6 persen. "Mencapai target

tersebut menjadi tanggungjawab semua sektor, kader, pengusaha, perguruan tinggi dan banyak pihak lainnya," jelas Sukaryo Teguh.

Sukaryo Teguh mengatakan, wujud konkrit penugasan PPS kepada BKKBN selaku ketua pelaksana, maka sebagai lembaga yang menangani keluarga, fokus penanganan *stunting* dilakukan melalui pendekatan pencegahan.

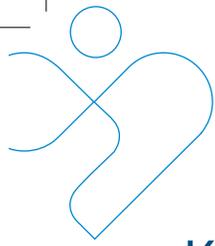
Persoalan gizi memang menjadi faktor utama mengapa balita menjadi *stunting*. Namun demikian, kata Sukaryo Teguh, pola asuh juga sangat berpengaruh untuk menjadikan apakah balita *stunting* atau tidak. Termasuk juga dalam hal perencanaan keluarga.

Menurut Sukaryo Teguh, ada kekuatan luar biasa di lapangan dalam program PPS. Kekuatan dimaksud adalah hadirnya Tim Pendamping Keluarga (TPK). Jumlah personil tim ini sebanyak 600.000 orang, sementara timnya sendiri sebanyak 200.000 tim.

TPK di antaranya bertugas melakukan pendampingan pada keluarga-keluarga risiko *stunting*, bayi di bawah dua tahun harus didampingi dengan baik. Termasuk pelayanan KB, dalam upaya bagaimana membangun keluarga sejahtera.

Sukaryo Teguh mengatakan tujuan program KB adalah untuk mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). "Mulai 2021 seiring 270 juta harus berkualitas, maka tantangannya cukup berat untuk mewujudkan keluarga berkualitas," ujar Sukaryo Teguh.

Editor: Annisa H



Komitmen Dalam Program BKKBN

Walikota dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan Terima Penghargaan MKK



Walikota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, S.Sn menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) yang sematkan oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

■ Penulis: Dadang

SEMARANG, BKKBN – Bertolak ke Kota Pekalongan, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), menyematkan penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Walikota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, S.Sn.

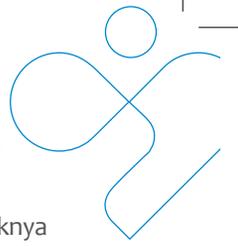
Penghargaan diberikan atas komitmen dan keseriusannya dalam upaya aktif menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kota Pekalongan.

Penyematan yang diberikan langsung oleh dokter

Hasto ini berbarengan dengan *Grand Final* Duta GenRe Kota Pekalongan, Sabtu (23/09/2023) di Hotel Howard Jhonson, Kota Pekalongan.

“Kami ucapkan selamat kepada Walikota dan Ibu telah meraih penghargaan MKK, dan itu menjadi teladan bagi kita semua,” ungkap dokter Hasto sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Selama ini Walikota Pekalongan telah aktif dalam menyukseskan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Komitmen ini ia wujudkan dalam bentuk dukungan pada program BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting), Makan Bareng Bumil, SABER AKI



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K).

AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Bayi), GEMARI (Gemar Makan Ikan), Rumah Singgah Gizi, dan Lakondik.

“*Stunting* di Pekalongan kita selalu mencari penyebabnya. Periksa hamil di Puskesmas gratis, merupakan salah satu upaya kami menekan *stunting*,” kata Walikota Pekalongan.

Ia juga mengupayakan adanya sinergi gotong royong antar lembaga, sehingga percepatan penurunan *stunting* bisa cepat dan tepat. Maka ia melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perlindungan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak, serta TNI dan POLRI.

“Kota Pekalongan memiliki komitmen tinggi yang ini juga bekerjasama dengan TNI. Sehingga ibu hamil, bayi



...adanya program ini terbukti mampu menekan terjadinya *stunting* di Jawa Tengah. Begitu pun dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Jika kehamilan dikontrol betul, nanti akan hilang *stuntingnya*

yang dikandung mendapat gizi seimbang supaya anaknya menjadi generasi hebat,” ungkap Walikota Pekalongan.

Di hadapan finalis Duta GenRe Kota Pekalongan, ia juga berharap pemuda pemudi Pekalongan bisa lebih aktif dan membawa nama baik Kota Pekalongan.

Begitupun Ketua TP PKK, ia mencoba mengoptimalkan peran mereka melalui Bunda GenRe dengan aktif mengedukasi dan menyiapkan remaja remaja yang berwawasan, tidak menikah dini, dan menjadi remaja yang lebih produktif dan terencana.

Mereka juga menjadi Bunda Literasi, Bunda PAUD, Duta Penurunan *Stunting*. Semua peran yang mereka dapatkan kemudian dioptimalkan dengan maksimal dalam upaya menyukseskan program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*.

Selain pemberian penghargaan oleh Kepala BKKBN, pada kegiatan ini juga berlangsung pembacaan komitmen deklarasi “*One Day One Egg*” oleh Sekda Kota Pekalongan. Deklarasi ini dilakukan oleh seluruh kepala OPD di Kota Pekalongan.

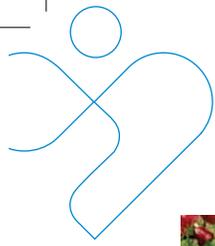
Kepala BKKBN optimis Kota Pekalongan bisa terus menekan angka *stunting*, dan mampu mencapai target nasional di tahun 2024. SSGI mencatatkan pada tahun 2022 angka prevalensi *stunting* Kota Pekalongan adalah 23,1 persen. Hal ini masih menjadi PR agar bagaimana upaya untuk bisa mencapai 14 persen pada tahun 2024 bisa terwujud.

“Penduduk Pekalongan ada 300 ribu lebih. Karena rata-rata wanita melahirkan dua anak, maka hanya ada 16 per 1000 wanita hamil. Sehingga perbulan yang hamil rata-rata 400 orang, dan per hari 16 orang hamil. Dari angka itu kemungkinan yang berisiko *stunting* ada empat ibu hamil. Maka, kita punya Tim Pendamping Keluarga (TPK), Generasi Berencana (GenRe), Babinsa, Bhabin kamtibmas, kita keroyok empat orang hamil ini sampai jadi tidak berisiko melahirkan anak *stunting*,” kata dokter Hasto.

Dokter Hasto juga mendukung program Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya “*Jo Kawin Bocah*” dan “*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*”. Menurutnya, adanya program ini terbukti mampu menekan terjadinya *stunting* di Jawa Tengah. Begitu pun dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. “Jika kehamilan dikontrol betul, nanti akan hilang *stuntingnya*,” kata dokter Hasto menekankan kepada seluruh hadirin.

Dengan kondisi Kota Pekalongan saat ini, adanya komitmen dari Walikota dan juga pejabat pemangku kebijakan, dokter Hasto optimis bahwa *stunting* di Kota Pekalongan bisa diatasi dan berada di bawah 14 persen tahun 2024.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) berbicara di depan 32 Jurnalis dalam acara rutin dwi mingguan, Forum Jurnalis yang diselenggarakan BKKBN di Resto Zam Zam, Jakarta.

Ada Dukungan Dana Desa, Penanganan *Stunting* Jadi Ukuran Keberhasilan Kepala Daerah

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

JAKARTA, BKKBN — Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) mengatakan saat ini tidak ada kepala desa yang tidak khawatir dengan capaian *stunting* di wilayahnya. Pasalnya, Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat langsung ke desa diarahkan juga untuk penanganan *stunting*.

Hal itu dikemukakan dokter Hasto di depan 32 Jurnalis dalam acara rutin dwi mingguan Forum Jurnalis yang diselenggarakan BKKBN, Jumat (22/9/2023), di Resto Zam Zam, Jakarta.

“Uang sudah disediakan. Tenaga juga sudah disediakan. Sistem sudah ada. Mudah-mudahan hasilnya (penanganan *stunting*) baik,” ujar dokter Hasto di depan Jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Forta Bangsa Kencana).

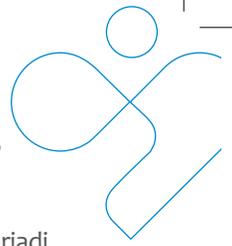
Dokter Hasto mengatakan salah satu prestasi kepala daerah diukur dari keberhasilannya menangani *stunting*

di wilayahnya. *Stunting* sendiri menjadi tematik dalam indeks prestasi reformasi birokrasi.

“Kenapa mereka takut, sebetulnya takut tidak berprestasi. Pejabat politik, tidak prestasi akan berpengaruh pada elektoral. Maka, mereka takut diumumkan gagal. Sementara Pj. Gubernur yang tidak bisa turunkan *stunting*, bisa saja dicopot jabatannya,” jelas dokter Hasto.

Sebagaimana diketahui, *stunting* disebabkan oleh faktor jauh, menengah, dan dekat. Bila faktor jauh teratasi dengan baik, menurut dokter Hasto, 70 persen akan berperan mengatasi *stunting*. Faktor jauh dimaksud adalah lingkungan, jamban hingga air bersih. “Namun mindset juga harus bagus,” tandas dokter Hasto.

Ia juga mengingatkan agar keluarga mengontrol betul penggunaan keuangan. “Dari pada beli motor, kalau orangnya waras, *mindset*nya bagus, barang-barang tidak penting. Lebih penting lingkungan baik, punya mindset



yang baik terhadap makanan. Sadar betul pentingnya protein hewani (bagi bayi),” ujar dokter Hasto.

Diingatkan oleh dokter Hasto agar ibu-ibu, sebagian bermukim di desa, sebaiknya menghindari anak-anak dari makanan yang tidak bergizi. Salah satunya cilok yang isinya hanya tepung dan penyedap rasa. “Saya pernah cek dapur rumah keluarga risiko *stunting*. Ternyata hanya ada nasi sama mie. Belum lagi kawin pada usia muda. *Mindset* faktor jauh bila bagus, ternyata mampu cegah *stunting* meski mereka tidak kaya raya,” jelas dokter Hasto.

Dalam kunjungan ke lapangan, dokter Hasto memaparkan pernah berdialog dengan seorang ibu yang memiliki anak usia 1,3 bulan. Namun ibu itu juga lagi hamil enam bulan. Pendidikannya S2. “Si ibu tidak menjaga jarak kehamilan. Kata ibu itu, sekalian repot,” ungkap dokter Hasto.

Mindset atau perilaku hidup seperti itu, kata dokter Hasto, berpotensi memunculkan *stunting* pada anak. “ASI tidak produktif gara-gara hasilkan hormon estrogen progesteron saat ibu hamil. Akibatnya, produksi ASI tidak keluar. Sehingga ASI bagi kebutuhan anak yang sudah lahir putus, tidak sampai diberikan selama 24 bulan.”

“Sementara puting yang diisap anak akan

mengeluarkan hormon prolaktin di otak ibu dan terjadi kontraksi di rahim ibu. Akibat kontraksi, bayi akan terjepit dalam kandungan, aliran oksigen tidak lancar. Bayi akan tersiksa. Belum lagi ketika bayi lahir, si kakak akan cemburu luar biasa, anak tersebut akan stres,” jelas dokter Hasto.

“Banyak orang berpendidikan S2 *mindset*nya salah. Melalui rekan media, harapan saya, *mindset* yang salah itu bisa diluruskan,” kata dokter Hasto penuh harap.

Stunting akan memicu penyintas *stunting* mudah terkena penyakit degeneratif di usia tua. Seperti diabetes millitus. Menurut Dr. dr. Rio Kristian Utomo, MH.Kes, CH, CMH, CHt, CSTMI, Konsultan Ahli Humas dan Media Center BKKBN, akibat penyakit diabetes millitus negara harus menanggung biaya perawatan sekitar Rp 20 triliun.

“Jadi, anak *stunting* nantinya menjadi beban negara,” ungkap Dr. dr. Rio Kristian Utomo, MH.Kes, CH, CMH, CHt, CSTMI yang tampil berbicara dalam acara tersebut.

Pada bagian lain penjelasannya, dokter Hasto menandakan bahwa BKKBN berencana mengukuhkan wartawan sebagai Duta *Stunting*. “Teman-teman media nanti jadi Kakak Asuh Anak *Stunting*. Nanti ditandemkan dengan perusahaan dalam gerakan percepatan penurunan *stunting*,” jelas dokter Hasto.

Dokter Hasto juga meminta dukungan pers nasional dalam menggerakkan calon pengantin (*catin*) untuk mendaftarkan diri di aplikasi *elsimil* (elektronik siap nikah, siap hamil) tiga bulan sebelum menikah.

Dengan tercatat dan terdatanya mereka di aplikasi tersebut, pemerintah bisa secepatnya melakukan intervensi manakala *catin* memiliki kondisi yang belum prima untuk hamil. Mereka akan “disehatkan” terlebih dulu sehingga tidak melahirkan anak *stunting*. Seperti pemberian tablet tambah darah agar Hb nya naik.

Di sisi lain, bila anak yang belum usia dua tahun berpotensi *stunting*, dokter Hasto meminta agar anak-anak tersebut harus segera ditangani. “Apapun ditempuh agar proteinnya masuk ke dalam tubuhnya. Misal, mie dikombinasi dengan telur, dicampur ikan atau dicincang. Apapun caranya harus ditempuh supaya bayi mendapat Makanan Pendamping ASI,” ujar dokter Hasto.

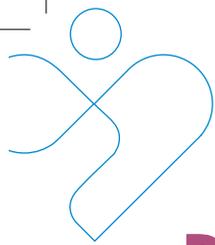
Menjawab wartawan terkait dana *stunting* di desa yang dialokasikan untuk pembangunan pagar, dokter Hasto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran *stunting* dari APBN sebesar Rp30 triliun. Sebanyak RP 20 triliun dialokasikan untuk program Keluarga Harapan. Sementara Rp 2 triliun dibagi 12 kementerian/lembaga. BKKBN mendapat porsi Rp 12 miliar, dialokasikan untuk gaji Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya ada 600 ribu orang.

Forum Jurnalis ini juga dihadiri Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN, Martin Suanta, Kepala Biro Umum dan Humas BKKBN, dr. Victor Palimbong serta Plt. Direktur KIE BKKBN, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si.

Editor: Annisa H



32 Jurnalis yang hadir dalam Forum Jurnalis tengah menyimak uraian Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K).



Dokter Hasto: TFR Turun Karena Pemakaian Kontrasepsi



“Sekarang yang bisa menyentuh angka 12% baru Jawa Tengah, Yogyakarta dan DKI Jakarta. Jawa Tengah karena waktu Pak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) menjabat itu banyak sekali dilakukan promosi untuk kesehatan reproduksi, sehingga angkanya cukup bagus,” tambah dokter Hasto lagi.

Adapun alat kontrasepsi yang gencar di kampanyekan adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), karena efek sampingnya minimal dan jangka waktu pemakaian yang panjang.

Seperti dikatakan dokter Hasto, “Penggunaan

■ Penulis : Fatimah

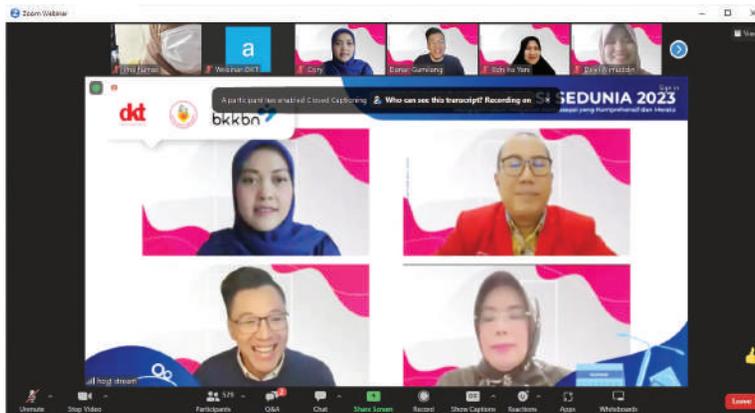
JAKARTA, BKKBN - Penggunaan alat dan obat (alokon) kontrasepsi baik IUD, pil, suntik, kondom, implan, suntik dan jenis lainnya telah mengantarkan Indonesia mencapai total fertility rate (TFR) 2,18 saat ini.

Dulu, di era 1970-an, TFR Indonesia sangat tinggi, rerata 56-57. “Penurunan TFR terjadi karena pemakaian kontrasepsi,” ujar Kepala BKKBN, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OC (K), dalam webinar *World Contraception Day 2023*, dengan tema “Mengoptimalkan pelayanan kontrasepsi yang komprehensif dan merata”, Rabu (27/9/2023).

Kontrasepsi juga berpengaruh besar terhadap *stunting*, menurut dokter Hasto. “*Stunting* sangat berhubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi karena berkaitan erat dengan *spacing*. Bahwa Presiden mengarahkan kepada kita untuk menuju angka 14%. Oleh karena itu salah satu yang penting untuk kita tekankan di sini, bagaimana kita menjaga jarak kehamilan.”

Begitupun dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dokter Hasto menjelaskan, “Ketika yang KB-nya tidak sukses, TFR tinggi, maka kematian ibunya juga tinggi. Bisa kita lihat Papua dimana kematian ibu masih 565/100.000 kelahiran, NTT 316, Sulawesi Barat masih 74. Ini sangat relevan dengan penggunaan kontrasepsi. Sukses menggunakan kontrasepsi sangat menurunkan kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB).”

Menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs), target AKI 70/100.000 di tahun 2030. “Waktunya tinggal enam tahun lagi. Sekarang masih 189/100.000. AKB yang juga masih perlu perhatian di wilayah Indonesia karena target kita tentu di bawah 12/1.000 kelahiran hidup.”



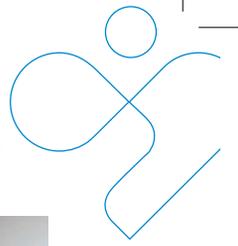
kontrasepsi semakin besar, persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) kita tertinggi di tahun 2022-2023. Sejak tahun 2017 belum pernah angka mCPR kita mencapai angka 59. Waktu pandemi hanya turun sedikit dari 57,9 menjadi 57 dan alhamdulillah sekarang menjadi 59,4.”

“Tetapi,” lanjut dokter Hasto, “pemakaian IUD mungkin kurang, susuk, kemudian juga medis operasi wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP) kurang, sehingga proporsinya terhadap yang pakai pil, kondom dan juga suntik rendah menjadi 22,03%.”

Dokter Hasto berharap bidan dapat mengutamakan MKJP dalam hal ini bisa pakai IUD, implan atau MOW dan MOP. “Bila ada kesulitan dalam kerja sama dengan dinas KB setempat dalam pelayanan KB, dalam akses alat dan juga anggaran, bisa disampaikan ke kami.”

“Setiap tahun ada 4,5 juta sampai 4,8 juta ibu melahirkan dan saya kira IUD menjadi salah satu yang penting untuk dilakukan pemasangan pada pasca persalinan,” terang dokter Hasto.

Editor: Santjojo Rahardjo



Diskusi Jurnalis dengan tema “September Jadi Penentu *Stunting*”, yang digelar BKKBN di Ruang Media Center BKKBN Pusat, Jakarta.

Cegah *Stunting* Pemerintah Prioritaskan Keluarga Berisiko *Stunting* dan Catin

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

JAKARTA, BKKBN – Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd menegaskan bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, pemerintah akan lebih memprioritaskan intervensi terhadap keluarga berisiko *stunting*.

Hal itu dikemukakan Sukaryo Teguh pada acara Diskusi Jurnalis dengan tema “September Jadi Penentu *Stunting*”, yang digelar BKKBN, Senin (11/9/2023), di Ruang Media Center BKKBN Pusat, Jakarta.

“Bila kita *declare* anak yang sudah *stunting*, kontribusinya hanya sekitar 20 persen terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS),” ujar Sukaryo Teguh.

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022, terdapat 13.511.649 keluarga berisiko *stunting*. Jumlah ini merupakan bagian dari 71.334.664 total jumlah seluruh keluarga di Indonesia.

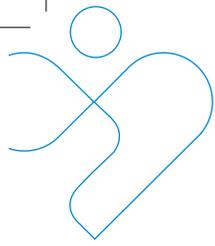
Di dalam keluarga berisiko *stunting* juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dengan kategori miskin ekstrem.

“Jangan sampai 13,5 juta keluarga berisiko *stunting* nantinya melahirkan anak-anak *stunting*. Maka, mereka menjadi sasaran prioritas,” tandas Sukaryo Teguh.

Selain menyasar pada keluarga berisiko *stunting*, Sukaryo Teguh menegaskan bahwa calon pengantin (*catin*) juga menjadi sasaran prioritas program PPS.

BKKBN mencoba menjaring *catin*, menurut Sukaryo Teguh, agar pencegahan *stunting* benar-benar dimulai dari hulu. “Pintu gerbang pertama adalah *catin*. Bila lolos, kita tangkap di ibu hamil. Sehingga kondisi bayi yang dilahirkan benar-benar sehat dan terbebas dari *stunting*,” ujar Sukaryo Teguh.

Menurut Sukaryo Teguh, pencegahan *stunting* difokuskan pada wilayah kecamatan hingga ke tingkat RT.



LAPORAN KHUSUS

“Mengapa kecamatan? Karena merupakan wilayah yang paling dekat dengan keluarga,” sebut Sukaryo Teguh.

Di wilayah kecamatan inilah para petugas di lini lapangan bergumul dengan tugasnya – dibantu para Pembina Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD – melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan.

Saat ini sedikitnya terdapat 14.000 Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Mereka tersebar di berbagai pelosok dan dalam menjalankan tugasnya dibantu PPKBD atau kader KB yang jumlahnya jutaan. Cukup efektif karena PPKBD, yang telah mengantarkan program KB menggapai sukses, menyebar hingga tingkat RT/RW di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam program PPS, para PLKB dan relawan kader KB ini dibantu oleh 593.137 personil yang tergabung dalam 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini terdiri atas bidan, kader PKK dan juga kader KB.

Fungsi dari masing-masing anggota TPK berbeda, tetapi memiliki tujuan sama, yakni memberikan pendampingan pada keluarga risiko *stunting* (KRS). Bentuknya berupa penyuluhan dan edukasi.

“Banyak keluarga belum tahu *stunting* dan bagaimana cara mencegahnya. Karena tidak semua keluarga mampu menjangkau pelayanan yang mereka butuhkan,” jelas Sukaryo Teguh.

Salah satu tugas yang diemban TPK adalah memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima KRS dengan baik. Seperti bantuan telur yang benar-benar harus dimakan oleh anak *stunting* atau berpotensi *stunting*, bukan oleh anggota keluarga yang lain.

“Tugas TPK adalah melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program sehingga tepat sasaran dan tepat manfaat,” tutur Sukaryo Teguh.

Berdasarkan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, target keluarga risiko *stunting* yang mendapat pendampingan TPK sebesar 90 persen dari total KRS yang ada.

Selain faktor spesifik terkait *stunting*, di antaranya pemberian ASI eksklusif, Sukaryo Teguh juga mengatakan bahwa faktor sensitif mengambil peran 70 persen atas terjadinya kasus *stunting*.

Mengutip data yang ada, Sukaryo Teguh mengatakan 3,8 juta keluarga memanfaatkan sumber air tidak layak, dan 6,7 juta keluarga menggunakan jamban tidak layak. Ini berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2022.

Sukaryo Teguh juga mengungkapkan bahwa hampir 100 persen kepala daerah menyatakan berkomitmen terhadap proram PPS. “Bupati dan walikota bicara *stunting*, itu luar biasa. Ini menunjukkan komitmen mereka,” tutur Sukaryo Teguh.

Hingga Semester I/2023, Pemerintah Provinsi yang telah mengalokasikan APBD untuk PPS mencapai 79

persen. Sementara di tingkat kabupaten/kota sebesar 80 persen.

Optimis Target Dicapai

Sementara Ipin ZA Husni selaku Program Manager Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, optimis target penurunan *stunting* menjadi 14 persen di 2024 akan terealisasi.

“Melihat *stunting* pernah turun 3,1 persen di tahun 2018 - 2019 dan 2,8 di 2021-2022, di mana ketika itu sarana pendukung dan komitmen pemerintah tidak selengkap dan sekuat sekarang dan ditambah adanya pandemi Covid-19, maka saya optimis penurunan prevalensi *stunting* sebesar 3,8 persen per tahun di waktu yang tersisa akan terealisasi. Sehingga target 14 persen akan dicapai di 2024,” papar Ipin.

Optimisme Ipin dilatarbelakangi adanya keterlibatan 19 kementerian dalam program PPS. Selain juga didukung keterlibatan langsung ratusan ribu petugas yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

“Dengan infrastruktur yang begitu lengkap, bukan hal mustahil penurunan *stunting* 3,8 persen per tahun bisa kita raih. Syukur lebih,” ujar Ipin berharap, seraya menambahkan, bahwa “Pelaksanaan yang baik tidak pernah mengkhianati hasil.”

Melihat capaian di Semester I/2023, Ipin optimis indikator-indikator capaian percepatan penurunan *stunting* akan mencapai target pada Juli-Agustus 2024, yaitu akhir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

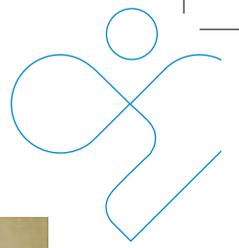
Berkat kerja bersama dengan pendekatan *pentahelix* yang melibatkan kementerian/lembaga, pengusaha, akademisi, perguruan tinggi, media, masyarakat, Ipin mengatakan prevalensi *stunting* berhasil diturunkan menjadi 21,6 persen berdasarkan hasil SSGI 2022.

Kata Ipin, ada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang dimasifkan BKKBN dan mitra kerja. Yakni, komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat, dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

“Apa yang dilakukan tidak mungkin dilaksanakan mulus manakala tidak didukung kebijakan di semua lini,” ujar Ipin, dengan mengingatkan bahwa dalam pemeringkatan terkait *Intelligence Quotient* (IQ), Indonesia berada di bawah Vietnam, Kamboja hingga pun Laos.

“Betapa besar pengaruh *stunting* terhadap suatu bangsa. Ini masalah kesehatan dan kecerdasan. Karena itu, zero *stunting* yang didengungkan sejumlah pemerintah daerah menjadi penyemangat untuk bersama menurunkan prevalensi *stunting* di masing-masing daerah,” jelas Ipin.

Editor: Annisa H



Perwakilan BKKBN Lampung bersama Tribun Lampung gelar program bertajuk 'Semesta Mencegah Stunting' di Aula Kantor Kecamatan Rajabasa.

Program 'Semesta Mencegah Stunting' 60 Paket Telur Dibagi Kepada Adik Asuh Stunting

■ Penulis : Satya

BANDAR LAMPUNG, BKKBN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung bersama Tribun Lampung menggelar program bertajuk 'Semesta Mencegah Stunting' di Aula Kantor Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat (8/9/2023).

Kegiatan ini dibuka Kepala BKKBN Lampung, dr. Nurizky Permajati, MH. Dihadiri pimpinan Telkom Indonesia-Lampung, Camat Rajabasa, Handry Satria Jaya SP. MM, Lurah Rajabasa, Candra Lela, SH, Kepala Puskesmas Rajabasa, drg. Susi.

Dalam kegiatan ini dibagikan masing-masing 60 butir telur kepada 10 adik asuh *stunting*.

Kepala BKKBN Lampung mengatakan Lampung merupakan provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah urutan tiga di Indonesia. Oleh karena itu, Kampanye #CukupDuaTelur diharapkan dapat turut serta mensukseskan program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, khususnya di Lampung.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tribun Lampung bersama PT Telkom Indonesia - Lampung atas pelaksanaan kegiatan "Social Movement: Semesta Mencegah Stunting," ujar Kepala BKKBN Lampung.

Menurut Nurizky, kegiatan ini menjadi praktik baik bagi mitra swasta yang telah ambil bagian dalam usaha

pengecahan dan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, khususnya di "Sai Bumi Ruwa Jurai."

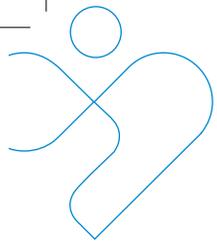
Program ini adalah hasil kerjasama Tribun Network dengan BKKBN pusat dan berlangsung menyeluruh di seluruh jaringan Tribun di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk konkrit dari komitmen dan kolaborasi antara BKKBN Lampung dan Tribun serta mitra lainnya. Digerakkan melalui intervensi langsung untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

Stunting dapat dicegah dengan konsumsi seimbang protein hewani pada balita. Telur dipilih menjadi sumber protein hewani yang paling banyak tersedia dan harga terjangkau. Selain itu, telur dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi anak selama pertumbuhan.

Diharapkan agar setiap orangtua, khususnya ibu, dapat memperhatikan gizi anak, khususnya anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, karena usia tersebut merupakan masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Cara yang sederhana dan relatif terjangkau adalah mengkonsumsi dua butir telur setiap hari karena dapat mencegah anak dari risiko *stunting*.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kejar Target *Stunting* 14 Persen, Sambas Perlu Kerja Keras

■ Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

PONTIANAK, BKKBN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menyatakan perlu kerja keras untuk menurunkan prevalensi *stunting* hingga target 14 persen pada 2024 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

“Pentingnya agar *stunting* 14 persen yang dituju, tapi Sambas sekarang 30,5 persen. Sehingga harapan saya mudah mudahan mencapai 14 persen. Tetapi seandainya tidak, ini di bawah 20% juga karena WHO mencanangkan setidaknya 20%. Kalau diatas itu masih sangat berat, paling tidak bekerja keras menurunkan *stunting* di Sambas,” kata dokter Hasto dalam Rakor Percepatan Penurunan *Stunting* se-Kabupaten Sambas, Kamis (7/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Hasto memaparkan sejumlah strategi dalam mengentaskan kasus *stunting* di Kabupaten Sambas dalam rangka mencapai target Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia 14% pada tahun 2024. Kabupaten Sambas sendiri merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Menurutnya jika kabupaten tersebut dapat menurunkan prevalensi secara signifikan, maka dapat menentukan pula keberhasilan Kalbar dalam mencapai target nasional.

Menurut dokter Hasto, *stunting* dapat dicegah melalui calon pengantin dengan melakukan pre-konsepsi dan melakukan pendataan melalui Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama, sejak Januari hingga Agustus 2023, tercatat 2.414 yang melakukan pernikahan di Kabupaten Sambas, namun pengukuran dan pendataan di Elsimil baru diisi oleh 529 orang secara *by name by adres*. Namun terlepas dari itu, Sambas merupakan kabupaten dengan pendataan Elsimil terbanyak di Kalimantan Barat.

“Ada 89 orang yang terlalu kurus terdata, saya punya alamatnya. Yang terlalu muda ada 71 orang dari 529. Ini baru sari 529. Saya minta yang 2400 kalau bisa didorong untuk ngisi elsimil. Yang anemia ada 100 orang lebih yang anemia. Tapi hati-hati yg terlalu gemuk juga ada banyak 80 orang. Inilah data yang harus perlu diperhatikan. Terimakasih meskipun yang ngisi elsimil masih rendah tapi ternyata itu yang ngukur paling banyak no 1 di Kalimantan Barat,” jelas dokter Hasto.

Dalam kesempata itu, dokter Hasto juga mengapresiasi Tim Pakar Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Sambas saat

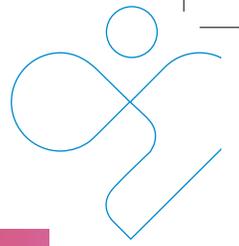


Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K).

menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* se-Kabupaten Sambas.

“Ada tim pakar audit kasus *stunting*, dari dokter anak, dokter obgyn, psikolog, luar biasa. Saya keliling ke Indonesia kemana-mana baru hari ini saya diberikan presentasi dari tim pakar audit kasus *stunting*, saya ucapkan terima kasih,” ucap dokter Hasto.

Hadir dalam acara ini, anggota komisi IX DPR RI Alifudin, Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, Deputi bidang KSPK Nopian Andusti, Direktur Bina Akses Pelayanan KB dr. Zamhir Setiawan Direktur Bina Ketahanan Remaja Dr. Edi Setiawan, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Ir. Pintauli Romangasi Siregar, Forkompinda Kabupaten Sambas, Sekda Kabupaten Sambas, para staf ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan/Instansi di lingkungan Pemkab Sambas, camat, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sambas, dan tim pakar AKS.



Audit Kasus Stunting

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi menyampaikan berbagai upaya intervensi yang dilakukan dalam mempercepat penurunan *stunting* baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Salah satunya adalah melakukan audit kasus *stunting*. Beberapa tahapan audit kasus *stunting* telah dilakukan mulai dari pembentukan tim audit, pengisian kertas kerja audit kasus *stunting* pada sasaran risiko *stunting*, hingga kajian dan perumusan tindak lanjut terhadap audit kasus *stunting* melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dan konsultasi. “Audit bertujuan untuk mencari penyebab kasus *stunting*, pencegahan kasus serupa selain membantu menyelesaikannya. Audit kasus *stunting* juga dapat membuka jalur koordinasi antar unsur pengambil kebijakan pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar,” paparnya.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sambas yang dipaparkan oleh Fahrur yaitu kurangnya akses layanan penerima manfaat serta intervensi spesifik dan spesifik seperti infrastruktur masih rendah, yaitu masih di angka 64,35%. Kondisi geografis Kabupaten Sambas mengingat Sambas merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, serta juga masih rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti kelas balita dan ibu hamil serta rendahnya peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan KIE.

Tim Pakar Audit Kasus *Stunting* turut menyampaikan mengenai upaya audit kasus *stunting* yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas. Koordinator Tim Pakar Audit Kasus *Stunting* dr. Zulkarman, menyampaikan perkembangan audit kasus *stunting* yang dilakukan terhadap beberapa



Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi.

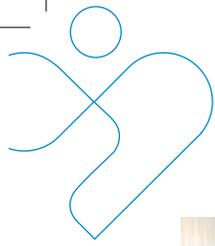
sasaran yaitu 4 auditi baduta berisiko *stunting*, 3 auditi dari ibu hamil, dan 2 auditi dari ibu nifas.

Zulkarman mengatakan Tim Pakar telah melakukan beberapa rekomendasi pengentasan *stunting* kepada auditi sasaran berisiko *stunting* seperti melakukan rujukan untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis anak maupun kandungan, penyuluhan dan melakukan KIE, melakukan pengukuran dan pemeriksaan secara rutin, hingga melakukan pemantuan kesehatan bersama berbagai pihak terhadap auditi kasus *stunting*. Harapannya dengan adanya audit kasus *stunting*, dapat membantu mengentaskan *stunting* dan mencegah kasus lainnya yang serupa.

Editor: Kristianto



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat meninjau dapur sehat atasi *stunting*.



Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Griya Persada Bandungan, Kabupaten Semarang.

BKKBN Sebut Penurunan *Stunting* Tidak Bisa Lepas dari Program KB

■ Penulis: Kristianto

SEMARANG, BKKBN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut percepatan penurunan *stunting* tidak bisa dilepaskan dari program Keluarga Berencana (KB). *Stunting* ada karena ada bayi yang lahir.

“*Stunting* itu karena ada bayi yang lahir. Tanpa ada bayi (lahir) ya, tidak ada *stunting*. Karena itu, percepatan penurunan *stunting* tidak bisa dilepaskan dari program Bangsa Kencana. Di sini peran penting para penyuluh KB mensosialisasikan program KB sekaligus mencegah bayi-bayi lahir dalam kondisi *stunting*,” kata Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso pada Sabtu (9/9/2023).

Pernyataan Teguh itu disampaikan saat menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Griya Persada Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelatihan digelar pada 8-9 September 2023 yang diikuti puluhan peserta terdiri dari ketua dan sekretaris Tim Kelompok Kerja (Pokja) di BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

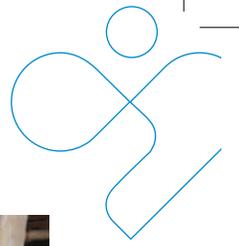
Teguh mengingatkan kepada para peserta pelatihan untuk terus menyosialisasikan program KB dan terus meningkatkan jumlah akseptor KB. Melalui program KB, Teguh menyebut hal tersebut bisa mencegah lahirnya bayi *stunting*. “Para penyuluh KB jangan sampai terlena. Turunkan *stunting* dan juga program KB diperkuat,” ujar Teguh didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih.

Selanjutnya Teguh mengapresiasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program percepatan penurunan *stunting*. “Kami menyambut baik kegiatan pelatihan ini karena hal ini menjawab tantangan yang dihadapi BKKBN dalam upaya menurunkan *stunting*. Pencapaian target prevalensi *stunting* 14 persen pada tahun 2024 harus kita sukseskan. Target ini bukan sekedar angka namun untuk mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas di masa mendatang,” jelas Teguh.

Antusias peserta pelatihan saat mendengar paparan seorang pelatih dan motivator yang bergelar guru besar Sri Hartono. Salah satu materi pelatihan yang disampaikan yakni bagaimana bekerja dengan pemilik masalah dan menggerakkan para pemangku kepentingan untuk program percepatan penurunan *stunting* melalui komunikasi perubahan perilaku. Peserta diajarkan untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya. “Penurunan *stunting* tidak bisa dilepaskan hanya dengan seremonial. Tetapi intervensi langsung kepada sasaran, yakni bayi-bayi *stunting*, ibu-ibu hamil, pasangan calon pengantin, dan keluarga berisiko *stunting*,” kata Sri Hartono.

Sri Hartono mengatakan perlunya perubahan *mindset* atau pola pikir masyarakat sehingga mampu mengubah perilaku pengasuhan, pola hidup, dan pola memberi asupan makanan. Perilaku yang baik dan sehat akan membuat anak-anak di Indonesia menjadi generasi yang berkualitas dan bebas *stunting* di masa mendatang.

Editor: Annisa H



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K).

Perkuat Kolaborasi dalam Penanganan Sulawesi Utara Gelar Safari *Stunting*

■ Penulis. Vin Mamarodia/Adv KIE

MANADO, BKKBN – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, berkomitmen menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 20 persen di 2023 dan 14 persen di tahun 2024.

Komitmen itu dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Hendra Tangel SH, yang mewakili bupati, pada kegiatan Safari *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur, beberapa waktu lalu.

Hendra juga menyinggung target ePPGBM akhir tahun 2023, dimana maksimal 6 persen prevalensi balita *stunting*, dan pengukuran balita setiap bulannya menjadi 100 persen di semua kegiatan Posyandu.

Sementara Wakil Gubernur Sulut, diwakili Kepala Dinas Dukcapil KB Daerah Provinsi Sulut, Christodharma Sondakh SH, mengatakan target pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia menjadi 14 persen di 2024 bukan hal mudah.

BKKBN yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Nasional sangat menyadari hal ini. Tugas mulia ini, katanya, hanya dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang solid dari pemerintah pusat, daerah sampai seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN No.

12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI).

Saat ini prevalensi *stunting* di Sulawesi Utara, sesuai Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tercatat 20,5 persen. Sementara Kabupaten Boltim sebesar 30 persen. Untuk mencapai target 14 persen pada 2024, pemerintah daerah hanya punya waktu sekitar satu tahun.

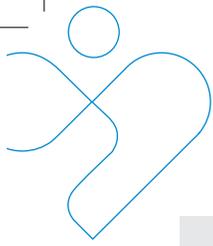
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Ir Diano Tino Tandaju M.Erg, mengungkap data dari hasil evaluasi dan penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) melalui safari *stunting*.

“Balita yang tidak terukur di Februari 2023 sebanyak 1.259 anak. Mereka perlu dikawal dan dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Boltim. Kami mendorong agar di pengukuran Agustus 2023, balita yang diukur bisa mencapai 100 persen,” ujar Diano.

Kegiatan safari *stunting* yang diadakan TPPS Provinsi Sulut demi memperkuat kolaborasi penanganan *stunting* ini dirangkai dengan pelayanan KB gratis Tim Safari *Stunting* Sulawesi Utara di Puskesmas Tutuyan. Dilanjutkan penyerahan bantuan oleh seluruh pegawai.

Perwakilan BKKBN Sulut juga memberikan bantuan makanan tambahan bagi anak *stunting* di Desa Tutuyan III, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim.

Editor: Santjojo Rahardjo



Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Dwi Listyawardani didampingi Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto pada acara Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) di Marunda, Jakarta Utara.

BKKBN Gandeng TNI AL Gelar Dapur Sehat Atasi *Stunting*

■ Penulis : Rizky Fauzia

BKKBN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng TNI Angkatan Laut mengadakan praktik baik Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Marunda, Jakarta Utara, sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko *stunting*.

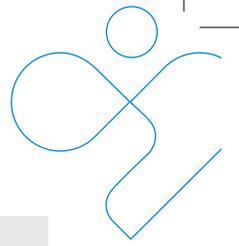
“Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat tentang kebutuhan gizi ya. Makanya di sini ada demo (masak), menyiapkan masakan untuk sasaran *stunting*,” kata Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Dwi Listyawardani pada acara Dapur

Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) di Marunda, Jakarta Utara, Kamis.

Kegiatan Dapur Sehat Atasi *Stunting* ini menjadi rangkaian acara dalam peringatan HUT Ke-78 TNI AL yang jatuh pada 10 September 2023.

Dwi Listyawardani mengatakan Dapur Sehat Atasi *Stunting* ini memfokuskan pemenuhan gizi untuk bayi, baduta, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui terutama dari kalangan keluarga kurang mampu yang kerap rawan mengalami kekurangan gizi.

Pada acara tersebut, para peserta diberikan



Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto menyerahkan bantuan pada acara Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dahsat) di Marunda, Jakarta Utara.

penjelasan mengenai gizi seimbang dan menu-menu makanan bergizi yang bisa dibuat dari bahan makanan yang murah dan mudah didapat.

“Dalam menu gizi seimbang itu harus ada kombinasi, termasuk bentuk penyajian harus menarik karena seringkali orang malas makan karena penyajiannya yang tidak menarik, apalagi anak-anak. Jadi, kreasi-kreasi inilah yang diperlukan,” kata Dwi Listyawardani.

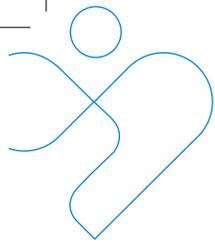
Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto menambahkan bahwa kolaborasi TNI dan BKKBN terkait *stunting* ini untuk menyukseskan program nasional percepatan penurunan *stunting*.

“Sebagai bentuk wujud dan perhatian TNI Angkatan Laut terhadap program nasional, tentunya perlu kita dukung secara kolaboratif,” kata Didong.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kolaborasi BKKBN dan TNI menggelar acara Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) di Marunda, Jakarta Utara.



Yayuk Basuki, Petenis Ulung Dekade 1990-an Yang Peduli *Stunting*

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

BKKBN – Dari lapangan tenis, kini berkiprah di kegiatan pencegahan *stunting*. Itulah kehidupan yang terjadi pada sosok petenis ulung dekade 1990-an. “Sebagai seorang ibu yang juga memiliki anak, saya terpanggil untuk turun bersama rekan yang lain, ikut menangani persoalan bangsa yakni *stunting*.”

Yayuk Basuki, dialah sosoknya, seorang petenis yang masih tetap dikenang oleh anak bangsa sebagai olahragawati yang tak pernah surut dari dunia olahraga. Lahir dengan nama Sri Rahayu Basuki, Yayuk adalah pemain tenis Indonesia yang terkenal pada era tahun 1990-an. Peringkat tertinggi yang pernah dicapainya adalah posisi ke-19 untuk kelas tunggal dan ke-9 untuk kelas ganda. Tentunya *level* dunia.

Sejak menggantungkan raket tahun 2004, Yayuk tetap berkegiatan di dunianya. Pernah menjabat Wakil Ketua KONI, Yayuk pun melebarkan kegiatan di organisasi sebagai Ketua Umum *Indonesian Olympian Association* (IOA) periode 2022-2026, sebuah

organisasi tempat berhimpunnya mantan atlet Olympic Indonesia.

Ketika program Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi isu nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Yayuk Basuki masih bergumul dengan dunianya. *Stunting* belum dilirikinya. Ia mulai peduli ketika tren prevalensi *stunting* meningkat di sejumlah daerah. Termasuk di tempatnya bermukim di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana penurunannya sangat tipis.

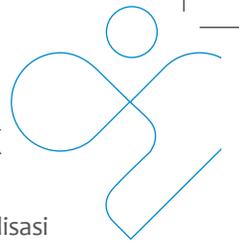
Di Di Yogyakarta, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2022), prevalensi *stunting* hanya turun 0,9% tahun 2022 menjadi 16,4%, dari 17,3% pada 2021. “Program ini harusnya menjadi tugas kita bersama untuk menurunkannya, sebagai kepedulian natural,” jelas Yayuk Basuki.

Kepedulian Yayuk Basuki terhadap upaya pencegahan dan penurunan *stunting* ternyata berdampak positif. Sejumlah rekannya memberikan dukungan. Bahkan beberapa di antaranya tertarik untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS). “Ada keterpanggilan untuk turun bersama atasi bersama turunkan anak *stunting* di Indonesia,” ujar Yayuk Basuki yang telah menjadi Duta Bunda Asuh Anak *Stunting*.

Mengaku mengenal *stunting* sudah sejak lama, Yayuk



Yayuk Basuki didaulat sebagai Duta Bunda Asuh Anak *Stunting*.



Basuki mengatakan kala masih aktif sebagai petenis ia kerap meninggalkan buah hatinya. Kala itu anaknya masih usia dini, ditinggal di rumah demi menjalankan tugas negara sebagai petenis profesional. “Bukan berarti saya lepas. Saya tetap memantau ketika lagi sibuk, dan suami melakukan pendampingan terhadap anak di rumah ketika saya tidak di rumah.”

Yang penting, kata Yayuk Basuki mengingatkan, asupan makanan bergizi bagi ibu muda dan ibu hamil harus diperhatikan. “Kalau sarapan harus ada ekstra telur, daging atau ikan. Jadi, kita harus memperhatikan anak sejak usia dini, sejak di kandungan,” tutur Yayuk Basuki.

Saat mengenang masa lalunya, Yayuk Basuki mengatakan saat ibunya mengandung dirinya, ia yakin asupan gizi yang diberikan ibunya cukup memadai. Boleh jadi karena orang tua Yayuk berharap buah hatinya akan dibentuk sebagai seorang olahragawati. Memang, sejak usia lima tahun, oleh ayahnya Yayuk Basuki sudah dikenalkan dengan olahraga tenis.

“Maka, ketika saya hamil, saya pun ingin anak saya

optimis percepatan penurunan *stunting* akan terealisasi menuju 14 persen pada 2024. Hal ini melihat BKKBN begitu masif membangun kemitraan dan menggerakkan komponen bangsa untuk mempercepat penurunan *stunting*. “Saya sendiri diberi amanah sebagai salah satu Duta Bunda Asuh Anak *Stunting*,” ujarnya.

Sebagai bunda asuh, saat ini setidaknya terdapat 48 anak dalam pengasuhan Yayuk Basuki. Mereka bermukim di wilayah Yogyakarta. Tepatnya di Kabupaten Kulonprogo. Setidaknya setiap hari Yayuk Basuki menanggung konsumsi 48 anak asuhnya, berupa pemberian dua telur per anak, minimal selama enam bulan. “Bantuan itu disalurkan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tugas TPK selain menyalurkan bantuan dari para pihak, juga mendampingi keluarga risiko *stunting* agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dikonsumsi setiap hari,” papar Yayuk Basuki.

Selain Kulonprogo, tepatnya di Kelurahan Kalirejo, Yayuk Basuki juga menjelajah Gunung Kidul, DI Yogyakarta, di akhir September 2023. Bukan sendiri, ia akan mengajak



Yayuk Basuki dalam berbagai kegiatan.

yang lahir harus sehat, cerdas dan tak kurang suatu apapun. Apa yang harus saya konsumsi, selalu saya konsultasikan dengan dokter kandungan,” jelas Yayuk Basuki yang menilai penurunan dan pencegahan *stunting* tidak mungkin dilakukan BKKBN semata.

Pencegahan dan penurunan *stunting* di mata Yayuk Basuki adalah harga mati. Tidak boleh ditawar dan harus dijalankan segera. Karena itu, ia memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang begitu *concern* dengan program percepatan penurunan *stunting*. “Mereka adalah anak-anak masa depan bangsa ini. Dari mereka lahir pemimpin bangsa yang kita harapkan. Akan menjadi kekuatiran bersama kalau angka *stunting* belum mampu kita turunkan,” urai Yayuk Basuki.

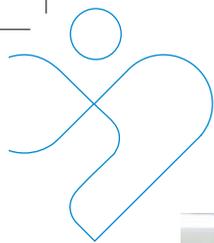
Alotnya menurunkan *stunting* di negeri ini, ditengarai Yayuk Basuki juga akibat masih ada keluarga yang malu mengakui anaknya mengalami *stunting*. Namun Yayuk

beberapa rekannya. Lokasi yang dituju adalah Kecamatan Semanu. Di sana, selain menubar bantuan, Yaysuk Basuki kemungkinan juga akan menggelar sosialisasi tentang *stunting*, penyebab dan solusinya.

“Ibu sibuk. Anak dirawat kakek dan neneknya. Mereka tidak paham tentang pola asuh. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” terang Yayuk Basuki.

Adakah kaitan *stunting* dengan dunia olahraga? Menurut Yayuk Basuki, “Ada”. “Anak-anak dari usia bayi harus dibimbing dan diarahkan ke sektor olahraga. Artinya, mereka harus diperhatikan asupan gizinya. Kita angkat mereka menjadi bibit-bibit unggul. Ini memang tidak bisa jadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas para pembina olahraga, didukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Kita ingin terjadi regenerasi olahraga ke depan,” harap Yayuk Basuki.

Editor: Annisa H



Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP/MTs se-Kabupaten Nganjuk.

Capaian Pendidikan Kependudukan Rendah Puluhan Kepala Sekolah dan Guru Ikuti Sosialisasi

■ Penulis: Toma Afriandi/Maulita Oktaviani

NGANJUK, BKKBN – Capaian pendidikan kependudukan jalur formal melalui sekolah di Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur) tergolong rendah. Hanya terdapat dua Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Capaian itu terekam dalam data *money penduduk.org* BKKBN, yang membawa BKKBN Jawa Timur, lebih khusus lagi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Kabupaten Nganjuk, melakukan intervensi lebih intens.

Salah satu intervensi itu berupa kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP/MTs se-Kabupaten Nganjuk, yang digelar Jumat (8/9/2023).

Dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diamanahkan bahwa pengembangan wawasan kependudukan harus disampaikan kepada seluruh masyarakat. Maka, pembentukan SSK harus diterapkan ke semua sekolah yang ada di wilayah masing-masing.

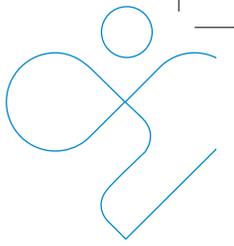
Kepala Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, menekankan bahwa pendidikan kependudukan harus sudah ditanamkan sedini mungkin ke siswa/i khususnya di Nganjuk. “Pada masa ini para siswa/siswi sedang mencari jati diri masing-masing, sehingga perlu diberikan informasi dan edukasi yang benar terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, anti *bullying* serta kenakalan remaja,” ucap Nafhan.

Nafhan juga menjelaskan pentingnya program-program lain bagi remaja. “Ada program Generasi Berencana (GenRe) dimana program tersebut menyerukan untuk menghindari tiga permasalahan remaja, yaitu tidak menikah dini, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan tidak terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, melalui Pokja Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Toma Afriandi, sangat mengapresiasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PPKB terhadap pendidikan kependudukan. “Inti dari penerapan Sekolah Siaga Kependudukan ini adalah dengan memasukkan tema maupun isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),” ujar Toma.

Toma menambahkan, penerapan kegiatan dalam SSK juga bisa diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing sekolah. “Misalnya saja kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), pramuka, fotografi, majalah dinding (*madang*), seni drama dan kegiatan ekstra lainnya. Dengan begitu, kegiatan penerapan pendidikan kependudukan menjadi lebih menarik bagi siswa dan siswi di sekolah,” pungkasnya.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kunjungi Kalimantan Selatan

Deputi BKKBN Serahkan Penghargaan di Dua Sekolah



Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtianto memberikan dua penghargaan predikat juara kepada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia dan SMPN 6 Kota Banjarmasin.

■ Penulis: Risna Yulida

BANJARMASIN, BKKBN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan dua penghargaan predikat juara kepada dua sekolah yang berada di Kalimantan Selatan.

Dua sekolah tersebut adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC Insan Cendikia) di Kabupaten Tanah Laut, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) di Kota Banjarmasin.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtianto, S.Si, M.Eg kepada kedua sekolah tersebut.

Di sekolah MAN IC Insan Cendikia, penghargaan langsung diberikan kepada kepala sekolah didampingi langsung Pj. Bupati Tanah Laut Ir. Syamsir Rahman, MS. Penghargaan dan apresiasi yang diberikan adalah Juara I Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna Terbaik Tahun 2023 Regional 2 dan Juara 2 Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tahun 2023 Tingkat Nasional.

“Teruslah bergerak untuk berprestasi. Jangan berhenti sampai di sini,” ujar Pj. Bupati Syamsir.

Dalam sambutannya Dr. Bonivasius memberikan

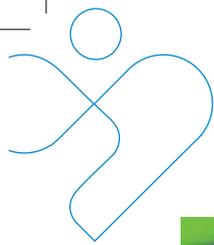
apresiasi kepada madrasah, guru serta siswa atas kontribusinya menyukseskan program SSK di MAN IC Tanah Laut ini.

“Sekolah Siaga Kependudukan hadir guna meningkatkan pemahaman siswa terkait kependudukan karena para siswa merupakan masa depan bangsa yang nantinya mengisi Indonesia emas tahun 2045. Anak-anak penting untuk terlibat pada program SSK sebagai langkah pencegahan terjadinya pernikahan dini,” ungkap Boni.

Di hari berikutnya, tepatnya di Hari Jadi Kota Banjarmasin, Boni menyerahkan penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan kepada SMP Negeri 6 Kota Banjarmasin dan diterima Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina.

SMP Negeri 6 Kota Banjarmasin sendiri mendapat penghargaan Juara I Tingkat Nasional SMP/Sederajat Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna dan Juara I Desain Logo Sekolah Siaga Kependudukan. “Karena ini contoh nasional yang ada di Banjarmasin, maka teman-teman di SMP Negeri 6 Banjarmasin bisa menularkan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya,” ujar Boni.

Editor: Santjojo Rahardjo



Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan menggelar kampanye perubahan perilaku, menasar anak-anak sekolah dasar kelas 5 dan 6.

Mudah Didapat di *Gadget*

Informasi Kespro Harus Diimbangi Pertemuan Tatap Muka

■ Penulis: Risna Yulida

BARITO KUALA, BKKBN – Lazimnya, perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara fisik adalah hal tabu untuk diungkapkan secara gamblang. Itu dulu. Tidak terjadi dengan anak-anak zaman sekarang. Mereka dengan mudah mendapat informasi tentang hal itu secara cepat, mudah dan dalam jumlah melimpah melalui *gadget*. Padahal tak selamanya informasi yang diterima mereka bernada positif.

Akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat informasi-informasi tersebut tidak terfilter dengan baik dan bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak.

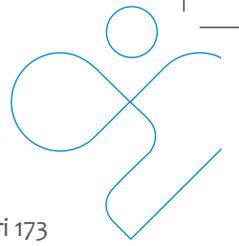
Untuk meminimalisasi dampak tersebut, pemerintah dan pihak terkait harus mengimbangnya dengan bentuk-bentuk pertemuan tatap muka, seperti sosialisasi dan kampanye. Dengan sasaran bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang tuanya.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan, melalui Ketua Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Hj. Misnaniah M.Pd MA, menangkap hal ini sebagai indikasi permasalahan ke depan yang dapat memicu hal-hal negatif apabila tidak ditindak lanjuti lebih jauh. “Anak-anak ini harus kita jaga dengan benar melalui pengawasan tersendiri serta melalui edukasi yang berkelanjutan sejak dini,” ucap Hj. Misna dengan penuh semangat.

Bersama Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan serta Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, bertempat di SDN Handil Bakti, Rabu (13/09/2023), dilaksanakan sosialisasi dan kampanye perubahan perilaku, menasar anak-anak Sekolah Dasar yang berada di kelas 5 dan 6.

Pada kelas-kelas ini didapati anak-anak putri mengalami masa pubertas ditandai dengan menstruasi pertama di usia 8, 9 dan 10 tahun.



Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Ir. H. Ramlan, MA, mendukung dan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terlebih hal ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Barito Kuala.

“Apresiasi yang tinggi kepada Ketua Dharma Wanita dan Pemerintah Barito Kuala yang telah menggandeng BKKBN sebagai pelaksana kegiatan ini. Ke depan kita bisa teruskan program sosialisasi dan kampanye kesehatan reproduksi ini pada sekolah-sekolah lain,” ungkap Ramlan.

Hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, H. Sumarji, S.Pd, M.AP pada kegiatan tersebut yang bertema “Anak Indonesia Sehat Cegah Anemia Peduli Kesehatan Reproduksi”.

“Kegiatan ini adalah yang pertama dilaksanakan yang sebelumnya hanya menyangkut pada anak-anak siswa SLTP dan SLTA dengan hanya memberikan tablet tambah darah saja. Ini akan terus kami lanjutkan sehingga perpindahan masa menjadi pubertas tidaklah menjadikan hal yang mengerikan untuk anak-anak dan bisa dilewati dengan hal-hal yang positif,” ungkap Sumarji.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat tepat dilaksanakan yang didasari salah satu tujuannya agar bermanfaat bagi anak-anak sendiri, seperti pemberian tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan. Kita mengharapkan anak-anak kita bisa siap pada kehidupan ke depan mereka,” ujar Sumarji.

Kegiatan ini, lanjut Sumarji, sekaligus menjadi pembuktian kerja nyata dan kolaborasi berbagai sektor, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah Barito Kuala juga mempunyai program di mana semua anak di kabupaten ini wajib sekolah. Di sekolah anak-anak akan kami awasi perkembangannya,” tandasnya.

Kegiatan ini dihadiri 200 peserta yang terdiri dari 173 siswi dan 28 orang tua wali murid. Turut hadir Kepala Dinas OPD KB Kabupaten Batola, Kepala Puskesmas Semangat Dalam, Korwil Bidang Pendidikan dan Pengawas SD Kecamatan Alalak, Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN Handil Bakti, Koordinator Pemuda Bakti Banua Yayasan Hasnur Center, Nara Sumber (dr Budi Irawan dan Ridha, Duta Generasi Berencana Kalimantan Selatan).

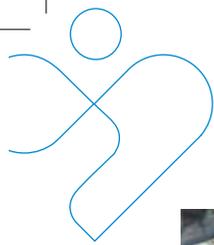
Berdasarkan laporan ketua pelaksana, kegiatan ini menjadi bekal yang sangat penting pada anak yang sedang mengalami dan akan memasuki masa pubertas. Dari data 73 siswi terdapat 13 persen yang sudah mengalami masa pubertas (menstruasi).

Sejumlah orang tua yang hadir menyatakan sangat mendukung kegiatan ini dan berharap keberlanjutan dari kegiatan seperti ini. “Dengan adanya edukasi seperti ini kami tidak merasakan kebingungan lagi menghadapi anak-anak kami ketika mengalami menstruasi,” ungkap seorang wali murid.

Editor: Santjojo Rahardjo



Pembinaan kesehatan reproduksi dengan mengangkat kampanye perubahan perilaku, menyangkut anak-anak sekolah dasar kelas 5 dan 6.



Pelayanan KB dan sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah terpencil di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Kurangi *Unmet Need*, BKKBN Gelar Pelayanan KB di Wilayah Terpencil

■ Penulis : Ario Suhendra

PESANGKAYU, BKKBN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat terus berupaya mengurangi angka *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Sulawesi Barat. Salah satunya dengan mengadakan pelayanan KB dan sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah terpencil. Lokasinya di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Selasa (12/09/2023).

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Rezky Murwanto, bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pasangkayu, Suri Fitriah, hadir di pelayanan KB kegiatan Bangga Kencana Trabas (Terpencil dan Lintas Batas) hari kedua yang dilaksanakan di Pustu Pakawa.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Desa Pakava, Kaharuddin, Kodim 1427 Pasangkayu, Bhabinkamtibmas Desa Pakava, Tim Penggerak PKK Desa Pakava, Ikatan Penyuluh KB (IpeKB) Kabupaten Pasangkayu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Forum GenRe Pasangkayu.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di Dusun Waesuba, Desa Pakava, untuk bertemu dengan warga Suku

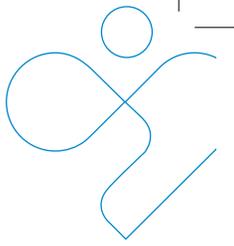
Bunggu untuk memperkenalkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pencegahan *stunting*.

Kondisi akses menuju Dusun Waesuba yang berlumpur dan melewati beberapa sungai, membuat warga Suku Bunggu kesulitan memperoleh akses pelayanan kesehatan. Rombongan membawa bantuan bibit tanaman untuk dimanfaatkan oleh warga Suku Bunggu serta bingkisan untuk anak-anak Suku Bunggu.

Menurut Rezky Murwanto, penyerahan bibit tanaman sebagai bentuk ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga. “Apabila bibit ini dikembangkan lebih maksimal lagi, dusun ini akan menjadi potensi lumbung pangan, ditambah lagi tanah yang subur sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di Pasangkayu,” Ungkap Rezky.

Sekretaris Desa Pakava, Kaharuddin mengapresiasi kehadiran dua pejabat tersebut beserta rombongan ke wilayah terpencil yang sulit diakses di Desa Pakava. Ia berharap apa yang telah diberikan untuk warga Suku Bunggu di Dusun Waesuba dapat bermanfaat.

Editor: Santjojo Rahardjo



Pembentukannya Lebih Target Maluku Patok Seluruh Desa Miliki Kampung KB pada 2024

■ Penulis: Tim Humas BKKBN Maluku

AMBON, BKKBN – Tahun 2023, Perwakilan BKKBN Maluku menargetkan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 15 Kampung KB. Namun animonya melebihi target.

Data itu dikemukakan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Dra. Renta Rego, saat membuka kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Seram Bagian Barat, di Kampung KB Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu Barat, Senin (11/9/23).

Menurut Renta Rego, Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai tahun 2022 berjumlah 30 Kampung KB. Untuk tahun 2023, jumlah Kampung KB yang dibentuk melebihi target, dari 15 terealisasi 25 Kampung KB atau mencapai 166,67%. “Diharapkan, tahun 2024 nanti seluruh desa di Kabupaten Seram Bagian Barat telah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,” ucap Renta.

Kampung KB merupakan salah satu ikon Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kehadiran Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa melalui Program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Dijelaskan, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan kebijakan yang memperkuat penyelenggaraan kegiatan dan program dari berbagai pihak. Baik dari kedinasan, dunia usaha maupun perguruan tinggi sebagai upaya bersama dalam peningkatan kualitas manusia dan keluarga Indonesia.

Keberadaan program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat), yang menjadi bagian dari kegiatan di Kampung KB, menjadi sangat penting sebagai upaya masyarakat setempat melakukan gerakan pencegahan *stunting*.

Melalui pemberdayaan masyarakat di Kampung KB, masyarakat desa ditempatkan bukan hanya sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian bantuan dari pemerintah semata, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang bisa berbuat secara mandiri. Sehingga terbuka ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi serta kreasi dalam memahami lingkungan dan sumber daya sendiri serta menyelesaikan masalah sendiri.



Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Dra. Renta Rego memberikan bantuan kepada masyarakat.

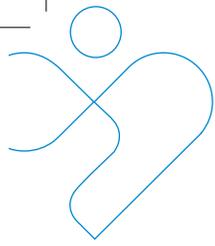
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BKKBN Maluku dan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Seram Bagian Barat. Tema yang diangkat: “Mari katong manggurebe mamasa deng alam yang ada par Potong Pele *Stunting*”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pokja Kampung KB dan mitra kerja dalam pengelolaan Kampung KB serta mempertajam pengetahuan terkait pengolahan menu lokal dengan bahan dari alam sekitar melalui Dashat.

Dalam kegiatan tersebut dihadirkan pemateri dari Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, Ika Febriansina Sirtolang. Ikut juga mengangkat materi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat, Gino Wairata, S.Kep. M.Kes.

Hadiri dalam kegiatan itu Kepala Desa dan Ketua PKK Desa Lohiatala, Tim Pokja Kampung KB, Neima Nurjannah, SE. M.Si, OPDKB Dalduk, Satgas *Stunting* SBB, Marvelony Titihalawa, SE serta Penyuluh KB Kecamatan Kairatu Barat.

Di sela kegiatan, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur kepada 10 anak *stunting* yang berada di Desa Lohiatala. “Pemberian makanan tambahan ini menegaskan bahwa selain menjalankan amanat program dari pemerintah, BKKBN Maluku juga hadir, peduli dan melakukan aksi nyata terhadap anak-anak *stunting* di wilayah ini,” kata Renta.

Editor: Santjojo Rahardjo



Peran Nyata Kampung KB Menurunkan *Stunting*

■ Penulis: Dadang

SEMARANG, BKKBN – Kampung KB (Keluarga Berkualitas) turut ambil peran dalam percepatan penurunan *stunting* di masyarakat. Bagaimana tidak, dengan adanya Kampung KB kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik, lebih terorganisir dan terukur semakin menguat.

Ririn Susrini, salah satu Kader PKK di Kabupaten Purworejo ketika berdialog tentang Kampung KB terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan tegas mengatakan keberadaannya berdampak positif.

Ia menjelaskan dampak positif itu terlihat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lebih terorganisir dengan baik. “Bagaimana Kampung KB bisa berperan aktif menurunkan *stunting*, bermula dari kegiatan yang terorganisir baik di Kampung KB. Kemudian berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat ke arah yang positif. Baik itu dalam hal pembinaan keluarga balita, ataupun pengawalan remaja dan calon pengantin,” papar Ririn.

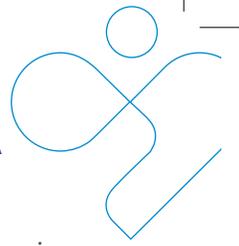
Ia menceritakan bagaimana kini aktivitas warga desa menjadi lebih produktif dan aktif ketimbang sebelumnya. “Aktivitas di Kampung KB Desa Bugel sudah berjalan meliputi berbagai kegiatan seperti PKK, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), bank sampah, kerja bakti, pengajian rutin, sekolah lansia, kelompok tani yang dilaksanakan sebulan sekali,” ungkap Ririn.

Berdasar penuturan Kader PKK tersebut, adanya Kampung KB juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. “Di desa kami kegiatan untuk mendukung kesejahteraan keluarga mulai bertambah, meningkat. Misal, kerja bakti rutin yang tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan, tetapi ada kegiatan menanam tanaman yang bermanfaat di setiap pekarangan rumah warga,” kata Ririn.

“Dampak ekonominya dengan menanam tanaman tadi, ketika panen kita bisa mengambil hasil dan bisa



Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB, Kabupaten Purworejo.



untuk mencukupi tambahan kebutuhan keluarga,” cerita Ririn di sela kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB, Kabupaten Purworejo, Senin (11/09/2023).

BKKBN melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB, terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan Kampung KB terkait Percepatan Penurunan *Stunting*. Termasuk juga meningkatkan capaian pembentukan Kampung KB dan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat).

Dari beragam kegiatan itu, kegiatan BKB mendominasi. Pasalnya, sebesar 84,2% atau sejumlah 128 keluarga dari 152 keluarga memiliki balita.

Pola pengasuhan menjadi salah satu penyebab terjadinya *stunting*. Di saat semua terfokus untuk membenahi gizi yang masuk di 1000 hari pertama kehidupan beserta langkah preventif lainnya, pola pengasuhan yang salah juga termasuk yang sangat mengambil peran akan terjadinya *stunting*.



Kampung KB Kokolaka, di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berhasil memaksimalkan potensi wilayahnya menjadi kampung tematik dan ekowisata.

Tentang *stunting*, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensinya masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah. Dengan prevalensi *stunting* berada di 21,3 persen, kerja bareng harus dimaksimalkan, sehingga target 14 persen di tahun 2024 betul-betul terealisasi.

Lain di Purworejo, lain di Kota Semarang. Di kota ini Kampung KB “disulap” menjadi ekowisata baru. Kampung KB Kokolaka, tepatnya di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berhasil memaksimalkan potensi wilayahnya dengan menjadi Kampung Tematik.

Di wilayah RW 01 dikembangkan usaha kolang kaling. Di RW 02 berupa kuliner olahan cabe rawit, RW 3 dengan jahe merahnya, dan RW 4 dengan produksi jambu kristal sebagai produk andalannya.

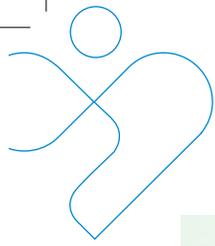
Kegiatan yang berbasis keluarga juga rutin diadakan, baik itu Posyandu balita, BKR, Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Adanya Posyandu, Bina Keluarga dan sederet kegiatan di Kampung KB dapat memberikan bantuan dalam upaya pencegahan. Juga penanggulangan *stunting* di masyarakat.

Dalam hal air dan sanitasi, Kampung KB Kokolaka mengaturnya dengan adanya selokan jenis terbuka dan tertutup di sisi jalan Kampung KB Kokolaka. Kampung ini juga memiliki sumber pasokan air yang berasal dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Dan seluruh Masyarakat di Kampung KB Kokolaka mendapatkan akses air bersih dari Pamsimas yang dikelola Kelurahan.

Kehadiran Kampung KB diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, serta pembangunan sektor lain dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) usai melakukan pemasangan implant pada akseptor di Puskesmas Jepon.

Edy Wuryanto

Optimalkan Sicita untuk Tekan *Stunting* Sampai Lapisan Terdalam

■ Penulis: Dadang

BKKBN – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto berkomitmen penuh atasi *stunting* di Indonesia. Hal ini bukan sekedar seloroh pejabat kepada rakyatnya, namun ini juga dibuktikan nyata dengan aksinya turun langsung bertemu masyarakat.

Edy Wuryanto yang pernah menjadi Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah periode 2010–2019 ini tidak main-main dengan komitmennya. Sebanyak 5000 ibu-ibu kelompok Senam Cinta Tanah Air (Sicita) dari 295 desa se-Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dikumpulkan di Lapangan Kridosono beberapa waktu lalu.

Bukan sekedar untuk senam bersama, tapi hal ini dilakukan Edy Nurwanto bersama BKKBN dalam rangka mensosialisasikan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. “Mereka ini yang nantinya menularkan pengetahuannya kepada masyarakat tentang risiko *stunting*, bagaimana menyelesaikan *stunting* jika ditemukan kasus, dan dapat memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menangani *stunting*,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.

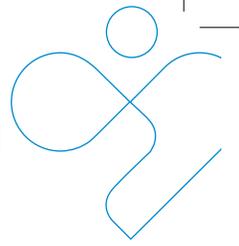
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mengungkapkan

bahwa secara nasional, prevalensi *stunting* berada di angka 21,6 persen, dan Kabupaten Blora berada pada angka 25,8 persen. Hal ini menjadi perhatian lebih pemerintah, termasuk Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto khususnya. Apalagi jika mengingat *stunting* memengaruhi kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Sumber Daya manusia yang berkualitas perlu dibangun dari saat ini. Dalam kaitannya mencapai generasi emas pada tahun 2045, maka *stunting* sebagai salah satu penyebab kualitas sumber daya manusia menjadi buruk harus bisa disetop jauh sebelum itu.

Dengan target sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni 14 persen *stunting* pada tahun 2024, maka menghentikan *stunting*, dan mencegah terjadinya ‘*new stunting*’ adalah hal yang harus dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

Menyadari perlunya gotong-royong dalam penanganan *stunting*, Edy mengajak dan memimpin ibu-ibu Sicita untuk turut berperan aktif dalam mengawal *stunting*. “Ini memerlukan peran ibu-ibu. Peran masyarakat penting,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.



Di hadapan 5000 ibu-ibu Sicita, ia juga menekankan untuk mau saling menjaga balita, remaja, dan ibu hamil di sekitarnya. Seperti halnya program yang dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni “*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*” yang merupakan program untuk menekan terjadinya AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi).

Begitupun “*Jo Kawin Bocah*”, yakni program untuk menekan terjadinya pernikahan dini di Jawa Tengah.

Kedua program pemerintah provinsi Jawa Tengah ini diyakini berdampak secara signifikan dalam mengintervensi terjadinya *stunting*. Pendekatan melalui kearifan lokal diharapkan mampu lebih dekat, rekam, dan tepat dikomunikasikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Edy menyebut ada beberapa faktor yang penyebab angka *stunting* meningkat. Mulai dari kemiskinan tinggi, maraknya pernikahan dini, pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Sehingga tidak heran jika angka *stunting* sampai saat ini masih cukup tinggi.

Namun ia juga menjelaskan bahwa sebetulnya ada banyak tersedia produk lokal yang murah dan bergizi untuk dioptimalkan dalam mencegah maupun menangani *stunting*. Seperti protein hewani yang bisa mengandalkan hasil ternak, bisa juga mengkonsumsi ikan air tawar

akhirnya lele tersebut bisa dipanen.

Pemanfaatan Lele dan produk lokal lainnya jika dilakukan secara masif, Edy optimis produk lokal bisa jadi peluang baru bagi Kabupaten Blera khususnya dalam penanganan *stunting*. Edy berharap betul jika penanganan *stunting* tidak berfokus oleh pemerintah saja, namun masyarakat juga. Sehingga pembagian 1000 bibit lele oleh BKKBN ini menjadi inisiasi bagi masyarakat Kabupaten Blera untuk bergerak bersama mengatasi *stunting*.

Kegiatan bersama Sicita adalah satu dari sekian banyak kegiatan dalam kepedulianya terhadap *stunting* di Indonesia. Menjadi anggota Komisi IX DPR RI dengan segala kesibukannya, tak lantas menjadikannya lupa untuk aktif mengawal kondisi sumber daya manusia Indonesia melalui penurunan *stunting*.

Bersama Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) ia juga turut aktif dalam mengkampanyekan “2 Anak Lebih Sehat”. Ia hadir mengikuti kunjungan pada kegiatan pemasangan alat kontrasepsi oleh dokter Hasto kepada akseptor di Puskesmas Jepon, Kabupaten Blera pada Minggu itu.

Edy Wuryanto dan dokter Hasto juga meninjau bagaimana pelayanan KB di Puskesmas tersebut. Dimulai dengan mengecek ruang pemasangan IUD, Ruang Nifas,



Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberi bantuan kepada masyarakat.

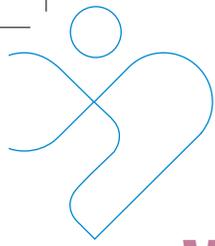
seperti lele. “Hari ini Kepala BKKBN membagikan 10.000 bibit lele. Semoga ini bisa menginisiasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dengan ternak lele. Hasilnya bisa dikonsumsi,” ucapnya.

Di Blera, bersama Kepala BKKBN, ia berkesempatan mengunjungi keluarga dengan balita *stunting*. Dilakukan pengecekan bagaimana kondisi keluarga tersebut, sehingga bisa terjadi *stunting* kepada anaknya. Yang kemudian diberikan bantuan berupa makanan tambahan, juga bibit lele yang diharapkan bisa dikelola sampai

berdialog dengan calon akseptor KB serta Tim Penggerak Keluarga yang turut hadir di Puskesmas tersebut.

Kehadiran dokter Hasto di Blera bersama Komisi IX DPR RI Edy Purwito adalah wujud gotong royong untuk bersama-sama mengentaskan *stunting* di Indonesia. Dan tidak bisa hanya oleh para pejabat saja dilakukan, perlu juga peran serta masyarakat yang secara aktif peduli, memahami apa itu *stunting* beserta pencegahan dan penanggulangannya.

Editor: Santjojo Rahardjo



Wanita Buddhis Indonesia, Bunda Asuh Anak *Stunting* di Kelurahan Cempaka Putih Barat

■ Penulis: Rizky Fauzia

JAKARTA, BKKBN – BKKBN menggandeng Organisasi Wanita Buddhis Indonesia menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Program ini bertajuk “Jakarta Beraksi (Bersama Atasi *Stunting*)” dan akan berlangsung selama tiga bulan atau 90 hari dengan program pemulihan anak yang terindikasi *stunting*.

Proram ini dicanangkan Jumat (08/09/2023) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mardani Asri, Jakarta Pusat.

“Seperti yang kita ketahui bahwa *stunting* tidak mungkin bisa teratasi manakala jika kita bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Dan secara khusus dalam program BAAS ini diantaranya adalah paket pemberian makanan tambahan. Kalau di program ini sifatnya adalah pemulihan. Terutama pada sasaran anak *stunting* supaya tidak *stunting* lagi,” jelas Penyuluh KB Ahli Utama Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc,Dip.Co pada saat memberikan sambutannya.

Menurutnya, format kegiatan BAAS di Kelurahan Cempaka Putih Barat sangat bagus. Karena tidak hanya memberikan bantuan saja tapi juga terdapat pengawasan dengan kartu kendali. Ini agar bantuan tersebut benar-benar dimakan oleh para balita sasaran. Ia berharap program ini selanjutnya bisa menyasar para ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Di sini luar biasa, ada sebuah kartu kendali di mana mungkin disitu secara interaktif kadernya melaporkan bahwa ini sudah diberikan. Mudah-mudahan juga ada laporan kalau ini sudah dimakan. Jangan sampai kalau sudah diantar ke rumah, yang makan orang lain bapak atau ibunya. Seperti ini kadang kita agak cerewet dan ribet. Karena kalau *stunting* itu harus dicerewetin supaya betul-betul apa yang sudah dibantu oleh donatur kita dalam hal ini WBI betul-betul sampai ke sasaran.”

“Mungkin sasarannya bisa juga bukan anak atau balita.



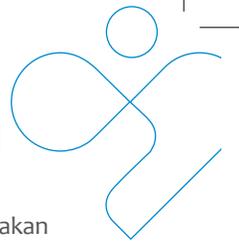
BKKBN bersama Organisasi Wanita Buddhis Indonesia di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat menggelar program bertajuk “Jakarta Beraksi (Bersama Atasi *Stunting*)”.

Bisa juga harapan kami kepada ibu hamil kekurangan energi kronik, terlalu kurus. Nah, itu tadi ibu yang sebetulnya tidak siap untuk hamil, tetapi dia keburu hamil,” terang Dwi.

Ia pun berharap, pengelolaan pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kelurahan Cempaka Putih Barat bisa berkesinambungan dan menjadi usaha ke depan. Selain itu, ia berpesan agar para orangtua harus memikirkan tumbuh kembang anaknya dengan merencanakan kehidupan berkeluarga, karena itu adalah hak semua anak.

Sementara itu, Ketua Umum WBI Lucy Halim yang hadir dalam acara tersebut mengatakan WBI sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam penurunan *stunting* demi masa depan anak-anak Indonesia.

“Setelah dengar ini (*stunting*) saya berpikir saya harus membuat satu sosial yang bisa membantu ngurangin anak *stunting*. Supaya membantu negara kita. Kita bangsa Indonesia, kita harus membantu negara kita. Maka itu saya kumpul seluruh Indonesia wanita Buddhis harus ikut



berdana, harus satu orang untuk satu anak untuk enam bulan. Jadi, kita bisa kumpul banyak dan saya sangat suka sosial ini orang.”

“Saya bisa laksanakan *stunting* ini. Karena merekalah generasi penerus kita. Kalau kita tidak jaga anak-anak ini, masa depan kita tambah suram. Anak-anak ini sangat penting untuk negara kita. Bila mereka cukup gizi, mereka akan bisa menjadi orang yang benar-benar bisa memimpin negara kita. Itulah yang membuat saya jadi berniat untuk membantu *stunting* ini,” kata Lucy.

Lucy menuturkan kegiatan serupa akan diadakan di dua titik lainnya yaitu Banten dan Sumenep. Selain BAAS, WBI juga mempunyai program bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin.

“Program kami dari WBI yang paling penting itu bimbingan perkawinan. Itu program kita yang pertama. Karena kita membimbing anak-anak remaja yang baru menikah. Kita membimbing mereka bagaimana mengatasi ekonomi, mengatasi rumah tangga mereka. Jadi, selama mereka mau menikah, dua minggu kita membimbing mereka, anak-anak remaja dari agama Buddhis kita. Supaya mengurangi perceraian.”

“Sekarang anak-anak sedikit-dikit cerai. Saya lihat banyak sekali anak-anak yang menjadi korban itu sehingga membuat saya membuat program ini, yaitu bimbingan perkawinan. Untuk anak-anak remaja,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma, S.Sos, M.AP juga mengedepankan tentang pentingnya kesiapan sebelum pernikahan. “Yang terpenting adalah sebelum kita memasuki jenjang perkawinan, di situ kita sudah melakukan intervensi mulai dari kelompok remajanya sampai mau menikah. Kemudian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan manusia di situlah titik penting anak akan menjadi *stunting* atau tidak. Yang penting di sini adalah semangat kepedulian kita semua. Tanpa ada kepedulian, tidak akan pernah terjadi kegiatan hari ini,” ujar Walikota.

Lanjutnya, “Kalau hanya melihat anak kita saja, pasti nggak akan ada gerakan-gerakan. Justru yang kita lihat di sini

adalah anak-anak kita semua, generasi penerus yang akan membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik lagi, karena mereka akan bertumbuh dan berkembang dalam era yang berbeda,” katanya.

Di Jakarta Pusat sendiri telah terbangun ekosistem dalam penanganan *stunting*. Menurut Dhany, di beberapa kelurahan di Jakarta Pusat, BAAS sudah berjalan seperti PAM Jaya menjadi BAAS di Bendungan Hilir, Green Pramuka menjadi BAAS di Tanah Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi BAAS di Kelurahan Deli Serdang.

Selanjutnya akan ada MNC menjadi BAAS di Kelurahan Galur serta Astra yang menjadi BAAS di Kelurahan Karet Tengsin. Menurutnya, program ini sangat berpengaruh dalam penurunan *stunting* di wilayah dan kunci penanganan *stunting* adalah kolaborasi semua sektor.

“Kuncinya, penanganan *stunting* nggak bisa hanya satu sektor saja, tetapi melibatkan semua sektor. Baznas sudah ikut ambil bagian di situ. Ketika didistribusikan, ada kader-kader PKK, ada lembaga PKK, ada UP2K yang melakukan upaya penjangkauan secara langsung. Kemudian diawasi oleh para Ketua RW dan Ketua RT. Kalau ada kendala dilaporkan lagi,” tutupnya.

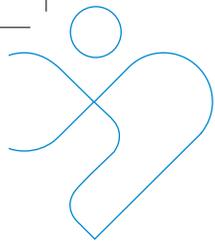
Anak-anak yang menerima manfaat BAAS di Kelurahan Cempaka Putih Barat berdasarkan data Puskesmas Cempaka Putih Barat, sebanyak tiga anak dengan kategori *underweight*, dua anak *wasting* dan lima anak *stunting*. Untuk anak *underweight* diberikan makanan tambahan selama 14 hari, sedangkan *wasting* dan *stunting* selama 90 hari.

Pencanangan Jakarta Beraksi juga dihadiri Ketua tim PKK Kota Jakarta Pusat, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Biro Kesos Sekda DKI Jakarta, Kepala Sudin PPAP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Sudin Kesehatan Jakpus, Camat Cempaka Putih, Plt. Lurah Cempaka Putih Barat, dan Kepala Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kolaborasi dalam Jakarta Beraksi (Bersama Atasi *Stunting*).



BKKBN-UIN Kembali Jalin Kerja Sama, Kali Ini Dalam Penanganan *Stunting*



Perwakilan BKKBN Jambi dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Jambi (STS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

■ Penulis : Rian Anthony

JAMBI, BKKBN – Kepala Perwakilan BKKBN Jambi dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Jambi (STS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

MoU itu juga melingkupi kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Utamanya dalam penanganan *stunting* dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno mengapresiasi pimpinan beserta jajaran UIN STS Jambi yang kembali melanjutkan kerja sama dengan BKKBN.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* pada balita sebagai prioritas yang harus dikerjakan dengan berbagai langkah strategis, efektif dan efisien.

BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* atau yang dikenal dengan RAN PASTI. Dalam Rencana Aksi Nasional, BKKBN harus mampu menyediakan data keluarga berisiko *stunting*, melakukan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, melakukan pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko *stunting* dan melakukan audit kasus *stunting*.

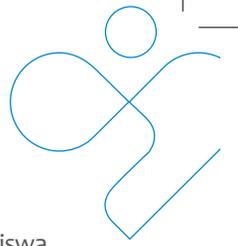
Selanjutnya, kata Putut, pemerintah juga telah menetapkan *stunting* (pertumbuhan kerdil atau tengkes) sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan, dari kondisi 24,4 persen tahun 2021 menjadi 14 persen tahun 2024.

Adapun prevalensi *stunting* di Jambi berada pada angka 22,4 persen, lebih rendah dari angka nasional. Capaiannya ditargetkan menjadi 12,74 persen pada 2024. “Untuk itu, konsistensi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung intervensi percepatan penurunan *stunting* harus kita jaga dan kita tingkatkan,” tandas Putut.

Dalam mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan BKKBN, termasuk dalam percepatan penurunan *stunting*, BKKBN memiliki Program Kampung Keluarga Berkualitas. Di kampung ini terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan, pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga.

“Dari Kampung Keluarga Berkualitas kita bisa melihat bagaimana implementasi berbagai program yang dilaksanakan untuk percepatan penurunan *stunting*, baik yang dilakukan BKKBN maupun yang dilaksanakan lintas sektor lainnya,” urai Putut.

“Hal ini tentunya sangat mendukung program percepatan penurunan *stunting*, yang merupakan salah satu program lintas sektoral yang melibatkan berbagai



instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atau yang lebih keren disebut pendekatan *pentahelix*,” ujarnya.

Dalam pendekatan *pentahelix*, elemen/sector yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah, masyarakat, swasta/korporasi, institusi pendidikan/universitas, dan media massa. Masing-masing bidang mengerahkan segenap upaya dan keahliannya dalam percepatan penurunan *stunting*.

“UIN sebagai Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di Jambi menjadi perguruan tinggi yang diharapkan mampu mengintegrasikan Program Bangga Kencana ke dalam perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pojok kependudukan, dalam rangka menumbuhkan wawasan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada generasi muda,” kata Putut.

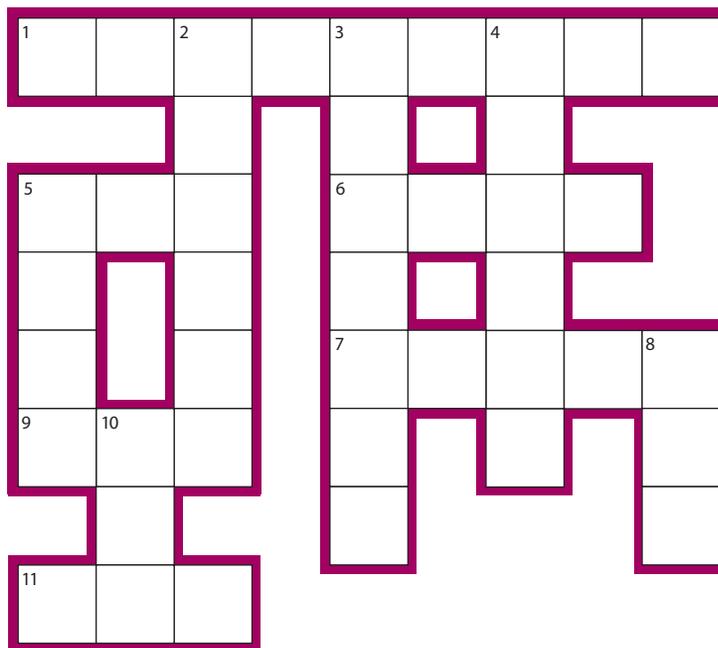
Salah satu kegiatan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan yang dapat diimplementasikan dalam

kegiatan kemahasiswaan adalah Program KKN Mahasiswa Penting (Mahasiswa Peduli *Stunting*) di Kabupaten/Kota. KKN Tematik *Stunting* yaitu KKN Mahasiswa Penting (Peduli *stunting*) merupakan wujud pembelajaran mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat tema *stunting*.

Selanjutnya, Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Provinsi Jambi dapat dijadikan sebagai laboratorium bagi perguruan tinggi dan institusi pendidikan untuk melakukan penelitian dan studi lanjut mengenai Program Bangga Kencana.

Sementara itu, Rektor UIN STS Jambi, Prof Su’aidi mengapresiasi kerja sama yang kembali dilakukan antara UIN dan BKKBN. Dia berharap program-program dalam kesepakatan bisa segera diimplementasikan di lapangan oleh mahasiswa bersama BKKBN.

Editor: Santjojo Rahardjo



TEKA-TEKI SILANG

TTS No.3/X/23

PERTANYAAN

Mendatar

1. Riset Kesehatan Dasar
5. Pemberian Makanan Tambahan
6. Minuman Sehat
7. Makanan Pendamping Air Susu Ibu
9. Audit Kasus *Stunting*
11. Bina Keluarga Balita

Menurun

2. Satuan Tugas
3. Aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur siap nikah
4. Dapur Sehat Atasi *Stunting*
5. Pemberian Makanan Bayi dan Anak Balita
8. Ikatan Dokter Indonesia
10. Kurang Energi Kronik

JAWABAN

TTS NO.2/IX/23

Mendatar:

2. Kerdil, 4. Stunting, 7. MDS, 8. SSGI, 10. Balita, 12. PHBS, 13. Buruk

Menurun:

1. Kronis, 3. IDI, 5. Tumbuh, 6. Gagal, 9. ASI, 10. BKB, 11. TDK

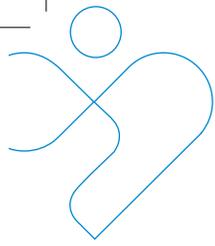
PEMENANG TTS HARAP MENGIRIMKAN
DATA MELALUI EMAIL
mediacenterbkkbn@gmail.com

PEMENANG TTS NO.2/IX/23

1. Rizki Aditra Sani
2. Triana Winni
3. Nia Rodearni
4. Perencanaan
5. BKKBN Riau
5. Ratih Rahmadani



Menangkan voucher pulsa senilai Rp 100.000 untuk 5 pemenang. Jawab pertanyaan pada kolom TTS dengan benar dan kirimkan jawabannya melalui mediacenterbkkbn@gmail.com. Pemenang akan diundi dan diumumkan di Sahabat Keluarga edisi berikutnya.



Siap Jadi *Pilot Project* Percepatan Penurunan *Stunting* Lebak Turunkan 1.500 Kader TPK pada Apel Siaga TPK Bergerak

■ Penulis: Chathiyana Fafilaya

SERANG, BKKBN – Pemerintah Provinsi Banten mencatatkan prestasi dalam program percepatan penurunan *stunting*, di mana angkanya berada di bawah angka *stunting* nasional 21,6 persen. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* Banten turun 4,5 persen, dari 24,5 persen di 2021 menjadi 20 persen di 2022.

Sementara berdasarkan hasil penimbangan bulan Februari 2023, dengan sasaran 919.680 anak dan jumlah yang diukur 809.483 anak, terdapat jumlah anak *stunting* sebanyak 28.770 anak atau 3,6 persen. Data tersebut berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dengan cakupan penimbangan sebanyak 88 persen.

Hasil Pendataan Keluarga tahun 2023 (PK23), jumlah keluarga risiko *stunting* tercatat sebanyak 532,580 keluarga. Dari hasil penapisan, sebanyak 63.700 keluarga tidak punya sumber air minum layak, 240.402 keluarga tidak memiliki jamban layak. Selain itu, sebanyak 810.842 keluarga di Banten dikategorikan sebagai keluarga risiko *stunting* berdasarkan penapisan Pasangan Usia Subur (PUS) 4Terlalu. Yakni Terlalu muda melahirkan, Terlalu tua melahirkan, Terlalu dekat jarak kelahiran, dan Terlalu banyak anak.

Maka, salah satu strategi percepatan penurunan *stunting* adalah dengan pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah aktor penting dalam melaksanakan pendampingan keluarga. Salah satunya memberikan edukasi kepada keluarga berisiko *stunting* tentang pengasuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, pemberian makanan bergizi termasuk menyusui, akses air bersih dan sanitasi.

Tak kalah penting adalah memfasilitasi keluarga berisiko *stunting* yang miskin untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tentunya, TPK harus berkoordinasi dengan fasilitator atau tenaga profesional yang ada di desa, Puskesmas dan dinas sosial.

Melihat begitu besarnya peran Tim Pendamping Keluarga, BKKBN Banten berkolaborasi dengan mitra mengadakan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Bergerak, di Gedung Sakinah Rangkasbitung, beberapa waktu lalu. TPK beranggotakan bidan, kader PKK dan



Pengukuhan Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

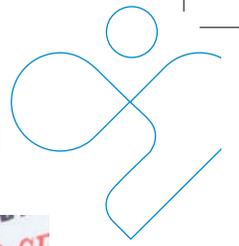
kader KB. Adapun mitra kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah program CSR PT. Catur Dalwah Crane Farmasi, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Banten beserta IBI Lebak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, TP PKK Kabupaten Lebak, Baznas, dan Tribun Banten.

Dihadiri 1.500 orang yang terdiri dari kader KB, kader PKK dan bidan dari 13 kecamatan di Kabupaten Lebak, kegiatan tersebut diawali dengan makan telur bersama, sebagai gerakan ajak cegah *stunting* dengan protein hewani.

Deputi Adpin BKKBN RI, Ketua IBI Nasional, Staf Ahli Gubernur Banten, Wakil Bupati Lebak, Kepala OPDKB Kabupaten/Kota, Ketua PD IBI Provinsi Banten, Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Lebak, Ketua TP PKK Kabupaten Lebak, dan Forkompimda Kabupaten Lebak turut hadir dalam acara tersebut.

Rusman Efendi, Kepala BKKBN Banten mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat, terutama bagi Tim Pendamping Keluarga, dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Banten. Kegiatan itu juga untuk meningkatkan silaturahmi kemitraan dalam meningkatkan komitmen bersama untuk menurunkan *stunting* di Banten.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, menyampaikan apresiasi kepada TPK yang telah berjuang keras dalam upaya menurunkan angka *stunting* di daerah ini. “Ini adalah



penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKKBN dengan Fakultas Kedokteran studi Gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Pengukuhan Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah Lebak dan para tim pendamping keluarga. Semoga ini dapat lebih meningkatkan motivasi mereka dalam mendampingi keluarga untuk mencegah *stunting*. Ini merupakan dukungan nyata terhadap kebijakan percepatan penurunan *stunting*,” ujarnya.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, berharap pemerintah pusat akan menjadikan Lebak sebagai *pilot project* penanganan *stunting* di Banten, bahkan nasional. Ade menyadari tantangan yang dihadapi wilayahnya karena begitu luas dengan jumlah penduduk mencapai 1,2 juta jiwa, sementara jumlah TPK hanya 3.204 orang kader.

Karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak, termasuk ibu-ibu PKK, Posyandu, bidan, dan pendamping lainnya dalam mengatasi *stunting*. “Kalo kita ingin menurunkan *stunting*, kita tidak bisa hanya segelintir orang. Harus semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua IBI Nasional, Emi Nurjasmi merasa terharu dan bahagia karena pada kesempatan tersebut diberikan kejutan tumpeng dalam rangka HUT IBI ke-72 oleh BKKBN Banten. Emi mengungkapkan perempuan bersama bidan punya peran penting dalam pencegahan *stunting*.

“Perempuan dengan bidan, bermitra. Jadi, kami punya *tagline* bidan sahabat perempuan. Karena memang di Indonesia bidan itu semuanya perempuan. Jadi, memiliki hubungan erat dengan perempuan, mulai pendampingan dari siklus reproduksi, sebelum kehamilan, saat hamil, melahirkan hingga pelayanan kontrasepsi, termasuk bayi dan balita.

Pada kegiatan tersebut panitia menyediakan *doorprize* yang diundi dari kupon yang dibagikan kepada peserta dan hadiah utamanya adalah 1 unit sepeda listrik. Umiyati, salah satu kader KB dari Desa Banjar Sari, Kecamatan Warung Gunung, merasa senang dapat hadir pada kegiatan Apel Siaga TPK ini, karena ia berhasil membawa pulang satu unit sepeda listrik dari undian *doorprize* di akhir acara. Umiyati mengatakan, sepeda listrik ini akan sangat membantu pekerjaannya sebagai kader KB. “Ga bingung lagi kalau mau keliling-keliling desa buat kunjungan,” ungkapnya.

Rangkaian Kegiatan

Kegiatan Apel Siaga TPK Bergerak Turunkan *Stunting* tersebut semakin marak dengan dilakukan pengukuhan

Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* atas keenam pimpinan aparat penegak hukum di Kabupaten Lebak, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Mayasari, SH, MH; Kepala Kepolisian Resor Lebak, AKBP Suyono, S.IK.

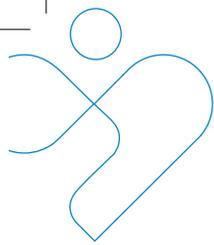
Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rangkasbitung, Iriaty Khairul Ummah, SH; Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Rangkasbitung, Suriyanta Leonardo Situmorang, Amd. IP, SH, MH; Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Lebak, John Heri Azmi, SH, Sp.N, MH; dan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Rangkasbitung, Jimi Siregar, SH, MH.

Acara ditandai pula dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKKBN dengan Fakultas Kedokteran studi Gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditandatangani Ir. Rusman Efendi, MM selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dan Dr. dr. Siti Farida, M.Kes, Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. PKS ini sebagai bentuk komitmen yang diwujudkan dengan aksi nyata peningkatan gizi masyarakat sebagai pencegahan *stunting* di Banten melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga ada pembagian bantuan makanan tambahan bergizi dari Baznas Provinsi Banten sejumlah 150 paket kepada keluarga risiko *stunting* dari Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak.

Kegiatan Apel Siaga TPK Bergerak semakin semarak dengan ditampilkan stand-stand miniatur program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), seperti stand Posyandu terintegrasi dengan BKB (Bina Keluarga Balita); Mobil Curhat Keluarga (MoCuGa). Digelar juga Gelar Dagang UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), Charity Butik Antik, dan stand Kampung KB (Keluarga Berkualitas) yang di dalamnya mempresentasikan Rumah Data Kependudukan dan menu Dashat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*).

Kegiatan tersebut juga tak luput dari adanya pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang terdiri pelayanan KB implan 100 akseptor dan pelayanan KB IUD sekaligus IVA test sebanyak 10 akseptor. IVA test dilakukan untuk mendeteksi dini kanker rahim. Sebelum pemasangan IUD, akseptor di tes IVA terlebih dahulu.

Editor: Santjojo Rahardjo



dr Hasto Menjawab

• Kesehatan Reproduksi

Pengaruh Ambeien saat Melahirkan

Pertanyaan:

Halo dokter Hasto. Saya mau tanya. Apakah masalah ambeien dapat mempengaruhi kelahiran normal. Mohon penjelasannya Dok?

SwagRobot (Sumber: TikTok BKKBN)



Jawab:

Ini pertanyaan bagus, karena banyak orang yang menderita ambeien takut menghadapi persalinan normal. Terutama saat mengejan dalam proses melahirkan.

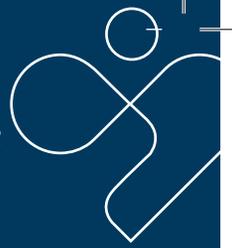
Ambeien pada ibu hamil itu hal yang sering terjadi, dikarenakan tekanan dari bayi saat kehamilan. Ambeien itu sebenarnya seperti varises. Kalau varises di kaki bisa kelihatan, tapi pada kasus ambeien hal serupa terjadi, tapi di anus yang mengakibatkan pembuluh darah vena membesar, menggelembung, mudah pecah dan akhirnya berdarah.

Tapi, kalau sudah tidak hamil, begitu bayi lahir ambeien sering sembuh sendiri. Saat nifas selesai, ambeien hilang dengan sendirinya.

Jadi sebetulnya, risiko besar ambeien saat melahirkan itu tidak ada. Dalam arti, saat mengejan dalam proses melahirkan terjadi pendarahan, itu hal yang biasa. Dokter yang menangani persalinan akan menjahit semua bagian yang robek akibat melahirkan, sehingga tidak perlu takut melahirkan saat menderita ambeien. Apalagi ketakutan itu membuat sang ibu meminta melahirkan melalui operasi cesar.

Tidak usah takut dengan ambeien. Konsultasi ke dokter, karena obat untuk ambeien dalam bentuk salep juga ada. Mudah-mudahan bisa teratasi dengan salep itu. Tapi, walaupun ambeien, tetaplah melahirkan normal, dan itu tidak apa-apa. ■

Redaksi menerima pertanyaan pembaca melalui email mediacenter@bkkbn.go.id atau melalui *Call Center* 0812 3888 8840, Media Center BKKBN



Unmet Need KB

Unmet Need. Banyak kalangan, termasuk pun peserta Keluarga Berencana (KB), asing dengan istilah ini. Apalagi kata itu berbau asing. Padahal *unmet need* sangat memberikan makna pada capaian program KB. *Unmet need* sendiri dikenal sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tren pergerakan *unmet need* di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 1991 hingga 2017. Sayangnya di tahun 2019 mengalami peningkatan lagi dan belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lantaran capaiannya 12,1% dari target 9,9%. Capaian ini naik dibanding tahun 2012 di mana rerata nasional 11,40% dengan Provinsi Papua tertinggi (23,80%), maupun tahun 2017 sebesar 10,60%, dengan Papua Barat tertinggi (23,60%).

Angka *unmet need* diperkirakan juga meningkat selama pandemi Covid-19. Di Indonesia setahun diperkirakan ada sekitar 4,8 ibu melahirkan. Dari angka tersebut yang langsung menggunakan kontrasepsi hanya sekitar 29 persen. “Masih diperlukan kerja keras dan kerja sama lintas sektor untuk menurunkan *unmet need*,” kata Dr. (H.C.), dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tidak ber-KB-nya kelompok tersebut memiliki beberapa alasan. Bisa karena sedang hamil, ingin anak segera, tidak ingin anak lagi, dan ingin anak ditunda. Dari kelompok PUS yang tidak ber-KB tersebut terdapat dua kelompok yang menjadi prioritas garapan program KB agar tercegahnya kehamilan tidak diinginkan.

Kelompok pertama adalah PUS yang tidak ingin anak lagi. Kelompok kedua, PUS ingin anak tapi ditunda. Terhadap kelompok tersebut tentu saja perlu dilakukan edukasi untuk mencari tahu penyebabnya sehingga dapat diberikan solusi dengan menggunakan kontrasepsi modern.

Unmet need menjadi persoalan serius karena bertalian dengan kematian ibu. Indonesia sendiri menduduki urutan ketiga tertinggi Angka Kematian Ibu (AKI) dibandingkan negara-negara ASEAN pada tahun 2017, dengan 177 kematian per-100 ribu kelahiran (Bank Dunia). Sementara Kementerian Kesehatan RI mencatat angka kematian ibu pada tahun 2022 berkisar 183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini jauh berbeda dibanding Malaysia dengan AKI 20 per 100 ribu kelahiran.

Sekjen Pokja Penurunan AKI dan *Stunting* dari Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dr. Dwiana Octavianty, Sp. OG(K) mengatakan kematian ibu terjadi bukan hanya karena terlambat datang pemeriksaan atau terlambat mendapat penanganan.

Ada beberapa penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia, mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita subur yang mengalami anemia, kurang kalori, obesitas, hingga mempunyai penyakit penyerta. Kehamilan di bawah umur juga menjadi penyumbang angka kematian ibu hamil.

Kehamilan di bawah umur berisiko tinggi karena kondisi fisik ibu belum matang.

“Tingginya angka *unmet need* di Indonesia berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu. Hal itu terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan,” tutur Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Imam Pasli. Sebuah Rapat Koordinasi Penurunan Angka *Unmet Need* Melalui Optimalisasi Pelayanan KB di Seluruh Wilayah dan Kelompok Sasaran, pernah diadakan. Kegiatan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah melakukan upaya penurunan *unmet need*.

Berdasarkan fakta di atas, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI. Salah satu cara yang dinilai paling efektif, itu tadi, dengan mengikuti program KB. Faktanya, tidak semua perempuan memiliki kecocokan saat melakukan program KB. Terutama dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi. Untuk itu, BKKBN menghadirkan varian kontrasepsi dengan tujuh jenis pilihan.

Untuk pasangan baru menikah, BKKBN mengarahkan agar mereka memakai pil, suntik, atau kondom. Sementara untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah memiliki anak dan di atas usia 35 tahun, BKKBN mengarahkan untuk memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Yang masuk dalam jenis kontrasepsi jangka panjang adalah, implan, IUD, Medis Operasi Wanita (MOW), dan Medis Operasi Pria (MOP).

Data yang dimiliki BKKBN menunjukkan tren penggunaan alat kontrasepsi atau cara KB didominasi oleh KB suntik, KB pil, baru disusul MKJP IUD, dan implan. Pemakaian MKJP menjadi program prioritas yang belakangan ini didorong BKKBN agar kesertaan ber-KB berlangsung berkelanjutan atau paripurna. Seperangkat alat/obat kontrasepsi inilah yang menjadi pilihan bagi PUS yang ingin ber-KB namun belum terlayani itu.

Kita ketahui juga bahwa setiap tahun di seluruh dunia terdapat jutaan wanita yang mengalami kehamilan. Ada kehamilan yang direncanakan, ada pula yang tidak. Setiap kehamilan seharusnya merupakan kehamilan yang diinginkan oleh si ibu. Termasuk kapan kehamilan dikehendaki dan berapa jumlah anak yang diinginkan.

Namun tidak semua wanita menghendaki dirinya hamil. Bahkan dapat menimbulkan perasaan *shock* dan menyangkal kehamilan tersebut. Bahkan pula, kehamilan yang tidak direncanakan dapat menyebabkan seseorang melakukan aborsi. Karena menganggap kehadiran anak belum waktunya atau belum siap karena terlalu dekat jarak melahirkan.

Maka, agar angka *unmet need* maupun AKI serta jumlah kehamilan tak diinginkan dapat diturunkan, apa yang dikemukakan Imam Pasli ada benarnya, bahwa pemenuhan alat kontrasepsi harus terpenuhi. Disamping itu, perlu dilakukan optimalisasi KB melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang juga mutlak dilakukan. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), demikian halnya, harus juga diperkuat. ■



Anda Berdua Tak Perlu Sampai Seperti Ini Kalau Segera Ber-KB Usai Persalinan



Sahabat Keluarga
Edisi Oktober 2023

Kehamilan dan pascapersalinan adalah masa yang indah sekaligus berat bagi bumil dan suami. Kurangi beban Anda dengan ber-KB sesegera mungkin, paling lambat 42 hari setelah persalinan. Dengan ber-KB, kehamilan berikutnya dapat dijaga jaraknya (minimal 2 tahun), memberi ibu waktu untuk memulihkan badan dan Anda berdua dapat fokus merawat bayi. Tersedia beragam pilihan metode kontrasepsi untuk Anda. Konsultasikanlah KB pascapersalinan di tempat layanan persalinan.